



Diskominfo



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 telah diselesaikan dengan baik.

LKIP SKPD Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah yang dipimpin selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tapin diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP ini.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Rantau, Februari 2023

Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin



H. M. Tamberin, S.Sos, MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 19630210 198603 1 028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	1
1.2. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3
1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Strategis	6
1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika	7
2. Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan	8
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
3.1.2. Pengukuran Capaian Atas Kinerja Jenjang Esselon III dan IV	29
3.1.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	33
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	34
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	36
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	41
3.1.8. Perbandingan Capaian atas IKU Level SPBE Tahun ini dengan Capaian Level SPBE Nasional.....	51
3.2. Laporan Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Tahun 2021	4
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022	13
Tabel 3.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	17
Tabel 3.2 Capaian Atas Sasaran Strategis 1 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	18
Tabel 3.3 Capaian Atas Sasaran Strategis 2 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	19
Tabel 3.4 Capaian Atas Sasaran Strategis 3 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	20
Tabel 3.5 Capaian Atas Sasaran Strategis 4 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	22
Tabel 3.6 Capaian Atas Sasaran Strategis 5 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	24
Tabel 3.7 Capaian Atas Sasaran Strategis 6 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	25
Tabel 3.8 Capaian Atas Sasaran Strategis 7 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	26
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022	27
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	33
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	35
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1,2, dan 3 dengan Program Aplikasi Informatika Tahun 2022.....	43
Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 4 dan 5 dengan Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022.....	46
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 6 dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2022	49
Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 7 dengan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022	50
Tabel 3.16 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022	53
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai) Tahun 2022.....	53
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) Tahun 2022.....	54

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) Tahun 2022.....	56
Tabel 3.20 Capaian dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022.....	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Melaksanakan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

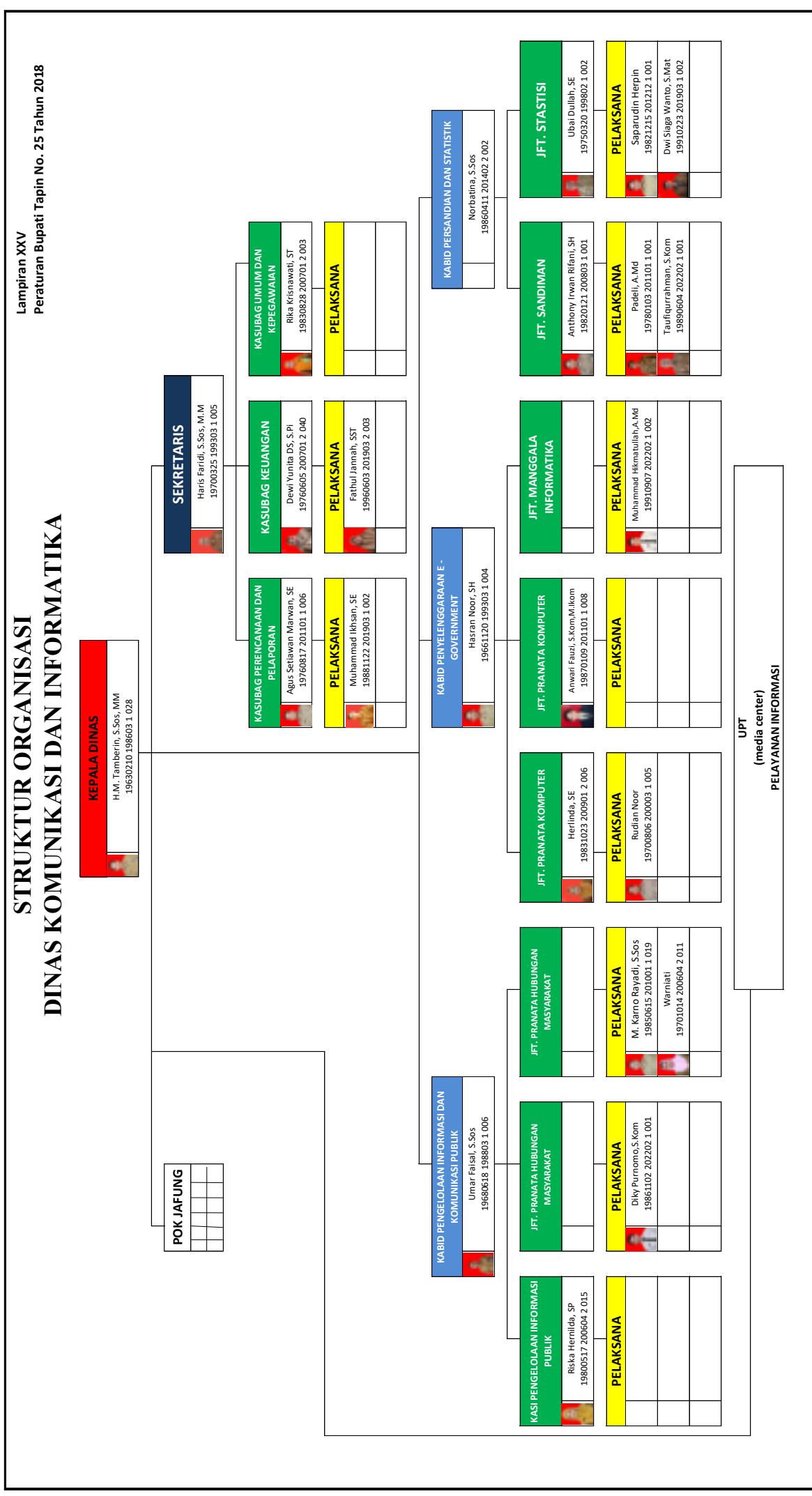
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Diskominfo Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang harus diterima oleh masyarakat;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan E-government;
3. Meningkatkan Peran dan Fungsi Persandian; dan
4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyediaan Data Statistik

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas;
 - a. JFT. Pranata Hubungan Masyarakat
 - b. JFT. Pranata Hubungan Masyarakat, dan
 - c. JFT. Pranata Hubungan Masyarakat
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri atas;
 - a. JFT. Pranata Komputer
 - b. JFT. Pranata Komputer, dan
 - c. JFT. Manggala Informatika
4. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas;
 - a. JFT. Sandiman, dan
 - b. JFT. Stastisi

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



1.2. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu strategis yang saat ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Masih kurangnya infrastruktur dalam rangka pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
2. Nilai SPBE Kabupaten Tapin masih dalam Level kategori “Cukup”;
3. Diseminasi Informasi pembangunan daerah yang belum maksimal;
4. Masih kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni permasalahan internal dan permasalahan eksternal, dimana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin permasalahan tersebut secara garis besar berupa :

1. Masalah Internal
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - b. Adanya keterbatasan Anggaran;
 - c. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana / infrastruktur TIK.
2. Masalah Eksternal
 - a. Masih adanya daerah blankspot terutama untuk daerah dengan kondisi geografis berbukit/pegunungan;
 - b. Belum terkoneksinya jaringan internet antar SKPD dan Kecamatan
 - c. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang disebabkan keterbatasan akses informasi; keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan mahalnya biaya komunikasi;
 - d. Masih adanya ego sektoral antar SKPD.

1.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar 70,15 dengan kategori “BB”, Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sudah memuaskan, Namun dalam hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa catatan yang menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

sebagai upaya perbaikan terhadap pelaporan sebagaimana yang termuat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1	Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target	Dinas kominfo akan menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan analisa dalam penetapan target baik dalam perencanaan maupun penganggaran (Proses)
2	Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat perencanaan kinerja;	Dinas Kominfo telah melibatkan semua unit / satuan kerja dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja melalui rapat internal
3	Memenuhi standar dalam pengukuran kinerja dengan membuat pedoman teknis pengukuran kinerja internal (minimal SOP);	Dinas Kominfo telah membuat SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja
4	Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan dengan membuat pedoman/SOP jika terjadi kesalahan data;	Dinas Kominfo telah membuat SOP Penanganan Kesalahan Data
5	Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;	Dinas Kominfo telah melibatkan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja melalui rapat monitoring dan evaluasi internal secara berkala
6	Menyempurnakan pengukuran capaian kinerja dengan membuat analisis relevansi dan kecukupan data kinerja;	Dinas Kominfo akan membuat Analisa relevansi dan kecukupan data kinerja (proses)
7	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja	Dinas Kominfo telah melakukan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Aplikasi E-Monev v2
8	Menjadikan pencapaian kinerja dalam pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan setiap pegawai	Dasar dalam pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja (TPP) akan diterapkan secara elektronik melalui aplikasi e-kinerja, e-presensi, dan e-sakip (proses)
9	Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja;	Dinas kominfo akan Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja (prose)
10	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian utama Pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pelaporan kinerja	Dinas kominfo akan menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya yang akan dibahas dalam rapat internal (proses)
11	Memanfaatkan informasi dalam laporan	Dinas kominfo akan menjadikan informasi

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya Kinerja organisasi	dalam laporan kinerja untuk menimbulkan pengaruh dalam peningkatan budaya kerja internal organisasi (proses)
12	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh , mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja	Dinas kominfo berkomitmen Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh (proses)
13	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, minimal sop evaluasi kinerja internal;	Dinas kominfo telah membuat SOP Evaluasi Kinerja Internal
14	Meningkatkan kompetensi evaluator internal dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi	Dinas Kominfo telah mengikutkan personil yang menangani akuntabilitas kinerja dalam peningkatan kompetensi melalui Bimtek dan Asistensi Sakip
15	Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja	Dinas Kominfo telah melakukan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan Aplikasi E-Monev v2
16	Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP.	Dinas kominfo telah menindaklanjuti LHE AKIP dan bukti tindak lanjut dari rekomendasi dengan menampilkan Nilai Sakip sebelum dan sesudah ditindaklanjuti dan mendokumentasikan pada website esr.menpan.go.id dan esakip v2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Untuk mencapai perencanaan strategis ini, berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan yaitu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Dalam mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/strategic planning. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimbas pada aspek peningkatan kecerdasan masyarakat telah mendorong lahirnya motivasi untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan daerah telah dilaksanakan. Kemajuan iptek dimaksud ternyata telah mempermudah mengakses segala yang terjadi khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya menyangkut kebutuhan informasi dan komunikasi. Peran komunikasi dan informasi yang berkembang secara lambat, akhirnya berhasil didukung oleh lahirnya teknologi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Jadilah konvergensi atau penggabungan antara komunikasi dan informatika.

Dalam rangka menunjang kesinambungan pembangunan yang bersinergi dengan komunikasi dan informatika. Maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu ditetapkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 – 2023 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Tapin dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018- 2023. Untuk mewujudkan perencanaan strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional.

1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

A. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika :

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah **“Terwujudnya Tatanan Komunikasi dan Informatika yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, Berdayaguna, Berhasil Guna dan efisien serta aman”**

Makna Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tersebut di atas adalah :

- Tatanan memiliki pengertian aturan atau tata tertib suatu sistem serta norma dan kaidah yang berlaku baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.
- Handal memiliki pengertian dapat di andalkan dalam setiap situasi dan kondisi.
- Berdayaguna memiliki pengertian berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat
- Berhasilguna memiliki pengertian dapat memberikan hasil
- Efisien memiliki pengertian tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)
- Aman memiliki pengertian bebas dari bahaya

Untuk mewujudkan cita-cita keinginan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diperlukan suatu perencanaan Program dan Kegiatan Organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 3 (tiga) Misi sebagai penjabaran dari visi.

B. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bagi Segenap Lapisan Masyarakat.
2. Menciptakan Pelayanan Pemerintahan yang didukung sistem aplikasi E-government.
3. Menjadi Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua.

2. Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi Dan Arah Kebijakan

A. Tujuan:

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dilakukan perubahan atas tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang harus diterima oleh masyarakat
2. Meningkatkan Penyelenggaraan E-government
3. Meningkatkan Peran dan Fungsi Persandian
4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyediaan Data Statistik

B. Sasaran:

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang/ sasaran berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang dinyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan Pertama : Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	
1.1	Memastikan seluruh Tapin bebas Blankspot di Tahun 2023	➤ Persentase Wilayah kabupaten Tapin Bebas Blankspot (%)
1.2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	➤ Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan kecepatan Internet Rata-rata 50 Mbps
1.3	Meningkatnya level SPBE Kabupaten	➤ Level SPBE Kabupaten Tapin
2	Tujuan Kedua : Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	
2.1	Memastikan seluruh aduan masyarakat ditindaklanjuti	➤ Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time dan ditindaklanjuti (%)
2.1	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	➤ Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap masyarakat (%)
2.2	Meningkatnya layanan statistik sektoral	➤ Persentase data statistik yang disediakan (%)
2.3	Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian	➤ Persentase layanan pengamanan data dan persandian (%)

C. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tujuan dan sasaran SKPD adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi dan Informatika yang sehat, effesien dan aman;
2. Mewujudkan Pemerintah Daerah Sebagai Government Publik Relation (GPR);
3. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas.

Sedangkan kebijakan adalah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Penguatan Media center, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
2. Penguatan Sistem dan Infrastruktur E-Government yang terintergrasi;
3. Meningkatkan Publikasi Survey yang mencantumkan ukuran kualitas.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian	Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Terpenuhinya Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot (%)	Masih ada Blankspot di beberapa desa	Jumlah Desa Bebas Blankspot ----- x 100% Jumlah Desa	Bidang Penyelenggaraan E Government
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Terpenuhinya Area Publik Tapin Internetnya tanpa terputus	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS	Masih belum meratanya Kecepatan internet di beberapa Area Publik	Jumlah Area Publik dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS ----- x 100% Jumlah Area Publik	Bidang Penyelenggaraan E Government
3	Meningkatkannya level SPBE Kabupaten	Meningkatkan level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	Belum sepenuhnya SKPD menerapkan SPBE	Level SPBE Kabupaten	Bidang Penyelenggaraan E Government
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (%)	Masih ada aduan masyarakat yang belum Respons Time	Jumlah Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Ditindak Lanjuti Sebelum 5 Hari Kerja ----- x 100% Jumlah Aduan Masyarakat Terverifikasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat (%)	Belum semua masyarakat menerima Layanan pemberitaan	Jumlah pengaduan secara elektronik yang telah ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah pengaduan yang masuk	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Uraian (3)	Indikator (4)	Alasan Pemilihan Indikator (5)	Formulasi Indikator Kinerja (6)	Penanggung Jawab (7)
6	Meningkatnya layanan statistik sektoral	Meningkatkan layanan statistik sektoral	Persentase data statistik yang disediakan (%)	Data statistik sektoral diperlukan sebagai data dukung pembangunan	Jumlah data Statistik Sektoral yang disajikan ----- x 100% Jumlah data Statistik Sektoral yang dikerjakan	Bidang Persandian dan Statistik
7	Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian	Meningkatkan layanan pengamanan data dan persandian	Persentase layanan pengamanan data dan persandian (%)	Jumlah Informasi dari pemerintah daerah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan dan pengamanan data	Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan ----- x 100% Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan	Bidang Persandian dan Statistik

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Esselon II	Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%
		Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS	90%
		Meningkatnya Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3
		Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time yang Ditindak Lanjuti	100%
		Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%
		Meningkatnya Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%
		Meningkatnya Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%
2	Esselon III (Sekretariat)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD	100%

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	(persen)	
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (persen)	100%
			Persentase Aset yang Tercatat (persen)	100%
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100%
			Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Wajib Disusun (persen)	100%
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	B
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang Wajib Disusun (persen)	100%
3	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	10 Dokumen
4	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang Disampaikan Tepat Waktu	3 Laporan
5	Esselon IV (Sekretariat) Subbag Umum Dan Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD	24 PNS 16 PTT
			Jumlah Aset yang Tercatat	230
6	Esselon III (Persandian Dan Statistik)	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah	Persentase Layanan Data Statistik Sektorial yang Disajikan (persen)	100%
		Meningkatkan Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian (persen)	80 %

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Statistisi Ahli Muda	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicitak	140 buah
8	JFT. Sandiman	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Penerapan Keamanan Informasi	80 %
9	Esselon III (Penyelenggaraan E-Government)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E Government	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang Memiliki Izin	100 %
10	JFT. Pranata Komputer	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI Gratis) bagi Masyarakat	3 Jaringan
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di data	75 Unit
11	JFT. Manggala Informatika	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jangkauan Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Waktu Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Bulan
12	JFT. Pranata Komputer	Terlaksananya Talaksana dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sub Domain)	1 Sub Domain

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksanannya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Pengelolaan Teknologi Informasi (Persen)	70%
		Terlaksananya Tatalaksana dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Domain)	1 Domain
13	Esellon III (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (Persen)	100 %
			Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (Persen)	100 %
			Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (Persen)	100 %
			Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media (Media)	6 Media
14	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten (Berita)	480 Berita
			Jumlah Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi Pelajar (Siswa)	60 Siswa
			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	1 KIM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mengetahui capaian kinerja SKPD, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang terealisasi dengan kinerja yang direncanakan (target). Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengukuran kinerja mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Jika hasil persentase yang diperoleh sama dengan atau lebih dari 100% maka dapat dikatakan kinerjanya terpenuhi atau tercapai, sebaliknya bila hasil persentase menunjukkan dibawah 100%, maka terjadi kemungkinan kinerja belum memenuhi target.

Sesuai dengan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dijabarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%	96,82%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	90%	66,67%
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	2,29
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100%	100%
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%	100%
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%	90%
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%	90%

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dijelaskan pada masing-masing sasaran strategis berikut dibawah ini;

SASARAN STRATEGIS 1 “Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023”

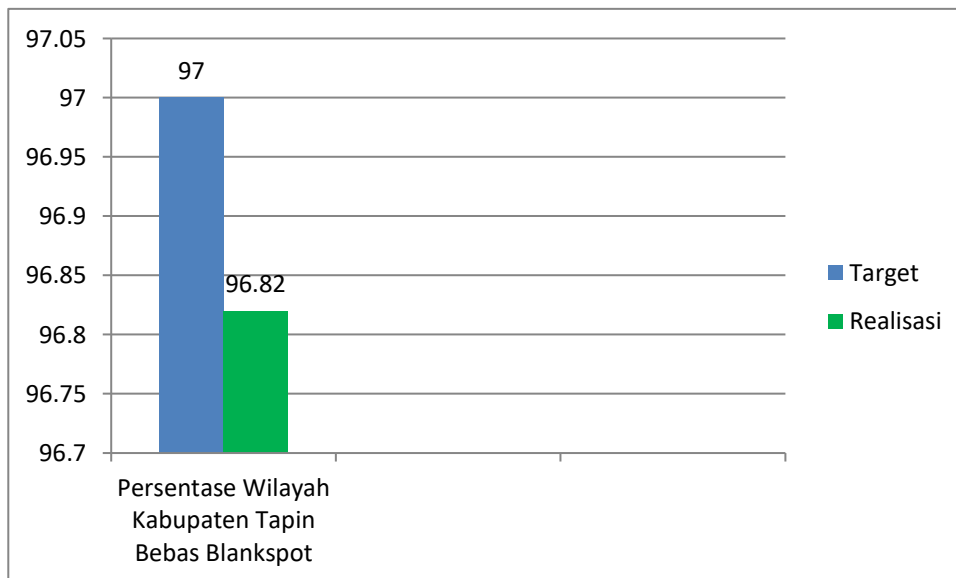
Pencapaian sasaran yang pertama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Atas Sasaran Strategis 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%	96,82%	99,81%

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot Tahun 2022 mencapai 96,82% telah terealisasi dengan baik dari target 97%, dengan capaian IKU sebesar 99,81% artinya untuk tahun 2022 dari 126 Wilayah Desa yang ada di Kabupaten Tapin sudah 122 Desa

yang terkoneksi Jaringan Komunikasi/Internet nya, pada tahun 2022 ini sudah mulai dioperasikan menara BTS oleh provider Smartfren pada 2 Desa di Kecamatan Hatungun dan Kecamatan Piani dan menyusul Desa lainnya dengan provider yang sama ataupun provider lainnya, dan ini akan terus berlanjut sesuai dengan target bebas blankspot di Tahun 2023, ini sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara terkait dengan dukungan Infrastruktur IT yang mendukung Transformasi Digital di wilayah Kabupaten/Kota tetangga pendukung Ibu Kota baru, sehingga mampu memberikan layanan informasi yang terbaik kepada masyarakat.



Grafik 1. Capaian Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot

Secara umum terkait dengan upaya layanan penyediaan jaringan internet/komunikasi di wilayah Kabupaten Tapin terhadap masyarakat sudah cukup baik dan kedepan diharapkan mampu menghubungkan seluruh Wilayah Tapin dari aspek Informasi dan Komunikasi.

SASARAN STRATEGIS 2 “Memastikan Area Publik Tapin Well Connect”

Pencapaian sasaran yang kedua menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Atas Sasaran Strategis 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	90%	66,67%	74,1%

Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-

rata 50 MBPs sudah kita lakukan pendataan dan sebanyak 36 dari 54 OPD yang kecepatan internetnya rata-rata diatas 50 MBPs dengan capaian 66,67%, dan bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 3 “Meningkatkan Level SPBE Kabupaten”

Pencapaian sasaran yang ketiga yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Atas Sasaran Strategis 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	2,29%	76,33%

Dari target SPBE Kabupaten Tapin memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 2,29 dengan predikat cukup, hasil ini masih berada dibawah target di level 3 dengan rasio capaian 76,33% terealisasi dengan baik dengan tingkat realisasi 2,29 dengan capaian 76,33 % di tahun 2022,

Untuk Area penilaian SPBE Kabupaten Tapin Tahun 2022 secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut.

SPBE	2,29
Domain Kebijakan SPBE	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,20
Domain Tata Kelola SPBE	1,30
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,04
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,50

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

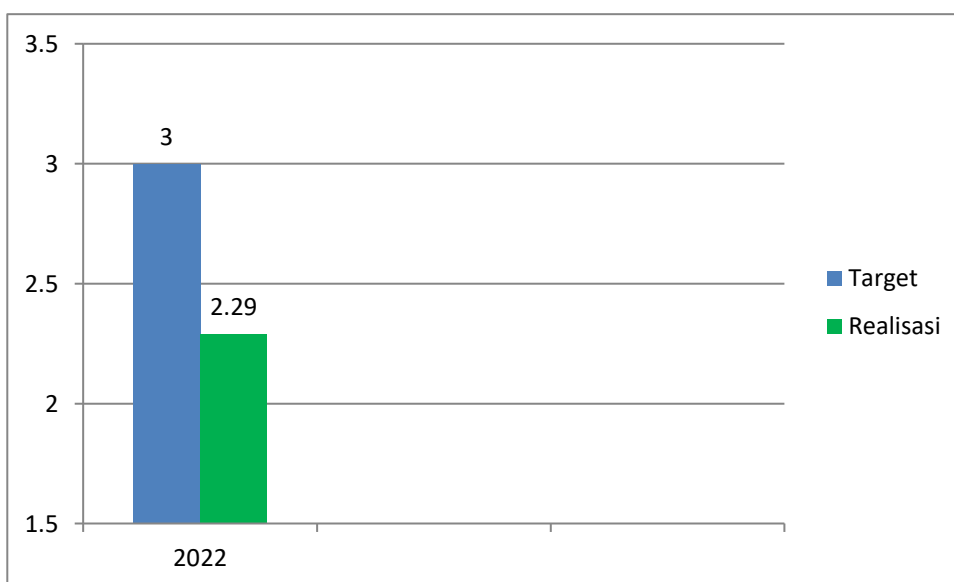
Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (SK terlampir), memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 2,29 dengan predikat Cukup, hasil ini masih berada dibawah target di level 3 dengan rasio capaian 76,33%. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut.

Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kembali meningkatkan indeks ini. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Secara umum evaluasi implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin mulai membaik yaitu dengan adanya Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana dan Arsitektur SPBE, tersedianya layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin telah mempersiapkan infrastruktur SPBE dengan baik, terutama pada domain Kebijakan dengan Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi, Kebijakan Internal Layanan Pengadaan, K.I. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, demikian juga, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik, Kebijakan Internal tentang Keamanan Informasi, kebijakan audit TIK, perlu ditingkatkan tata kelola, penerapan manajemen resiko SPBE dan audit TIK.

Kedepannya layanan-layanan berbasis elektronik dapat dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit kerja / OPD maupun integrasi dengan institusi lainnya melalui jaringan intra (Kabel Fiber Optik).



Grafik 2. Capaian Level SPBE Kabupaten Tapin

Hasil tersebut diperoleh dari penilaian mandiri/evaluasi kematangan dari pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin yang keterkaitan secara langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

SASARAN STRATEGIS 4 “Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti”

Pencapaian sasaran yang keempat yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini:

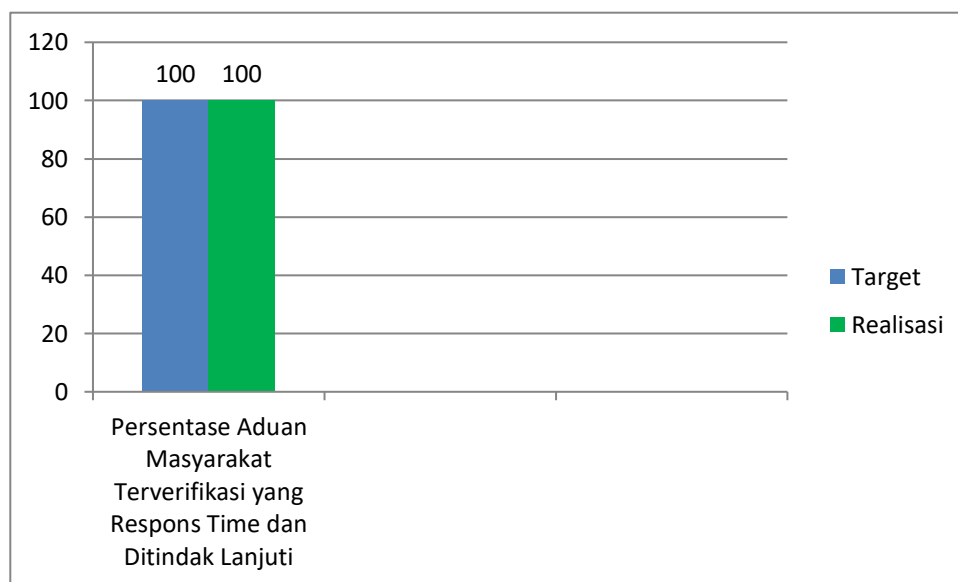
Tabel 3.5
Capaian Atas Sasaran Strategis 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%

Eksistensi pengaduan masyarakat memiliki peran penting bagi perkembangan organisasi menuju arah yang lebih baik. Namun apabila pengaduan masyarakat tidak dikelola/ditangani dengan baik, maka peran tersebut menjadi kurang maksimal. Fungsi pengelolaan masyarakat tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Fungsi tersebut antara lain monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat. Monitoring atas tindak lanjut pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk selalu mengetahui perkembangan atas kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, yaitu tingkat

keberhasilan, efektifitas, dan efisiensi tindak lanjut pengaduan masyarakat tersebut. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk melakukan kajian ulang atas hasil monitoring tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh.

Guna mewujudkan dan memaksimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat, perlu dibuat tata laksana penanganan/pengelolaan pengaduan masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa saluran pengaduan masyarakat adalah melalui surat, faksimili, SMS, kotak pengaduan, e-mail, telepon, meja pengaduan (helpdesk), dan web site atau aplikasi yang dibuat secara khusus untuk menampung aduan masyarakat secara online, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).



Grafik 3. Capaian Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti ditahun 2022 sebesar 100% dari target 100% sudah baik dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

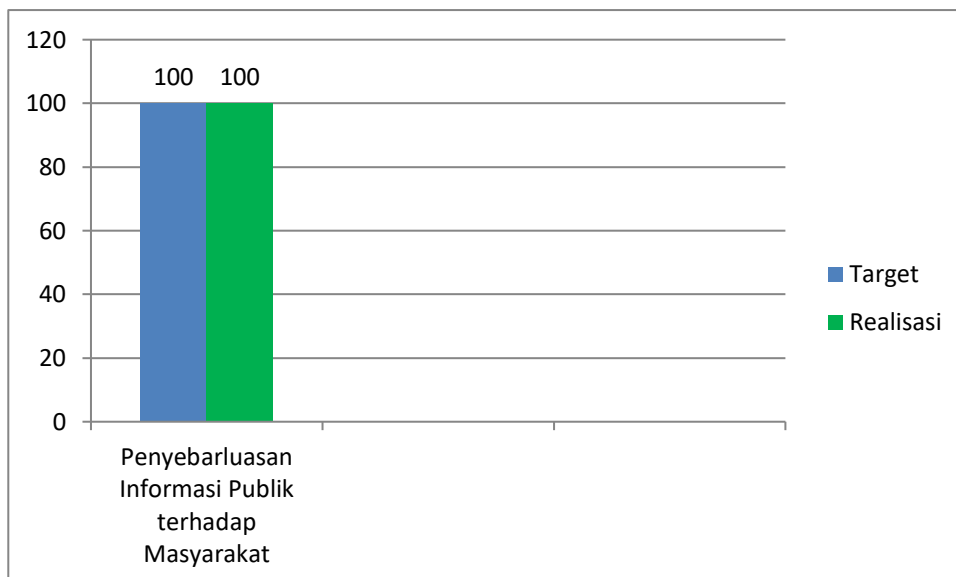
SASARAN STRATEGIS 5 “Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik”

Pencapaian sasaran yang kelima yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Atas Sasaran Strategis 5 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%	100%	100%

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pelayanan terhadap informasi kepada masyarakat melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022 sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, terealisasi dengan baik.



Grafik 4. Capaian Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat

Secara umum terkait dengan upaya pelayanan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik dari sisi penyediaan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik, selanjutnya ini akan terus berupaya pada tujuan-tujuan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi setiap tahunnya.

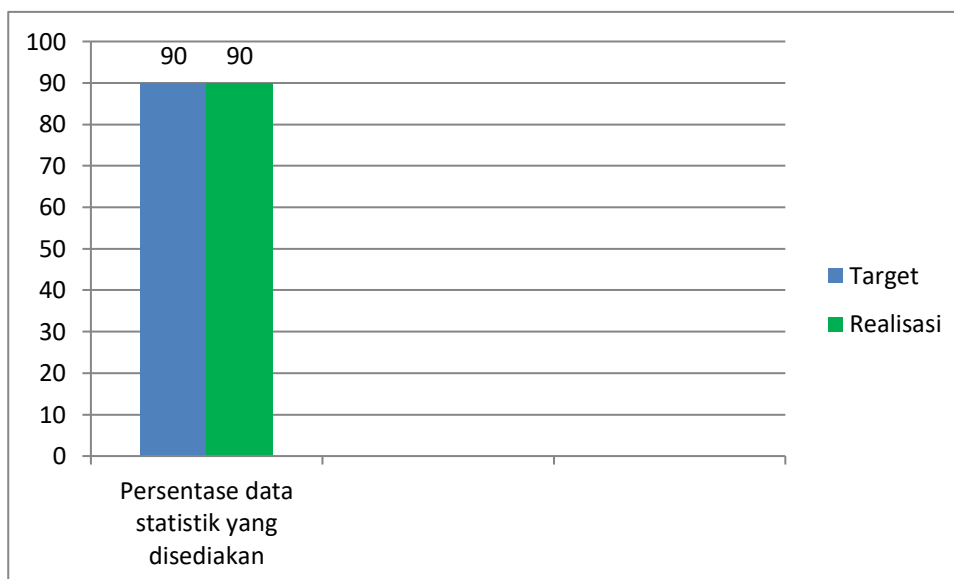
SASARAN STRATEGIS 6 “Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral”

Pencapaian sasaran yang keenam yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Atas Sasaran Strategis 6 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%	90%	100%

Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa SKPD telah menjalankan layanan statistik sektoral setiap tahunnya dan melakukan perbaikan data/ update informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan data statistik sektoral yang baik dan data statistik sektoral tersebut dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.



Grafik 5. Capaian Data Statistik Sektoral Yang Disediakan

SASARAN STRATEGIS 7 “Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian”

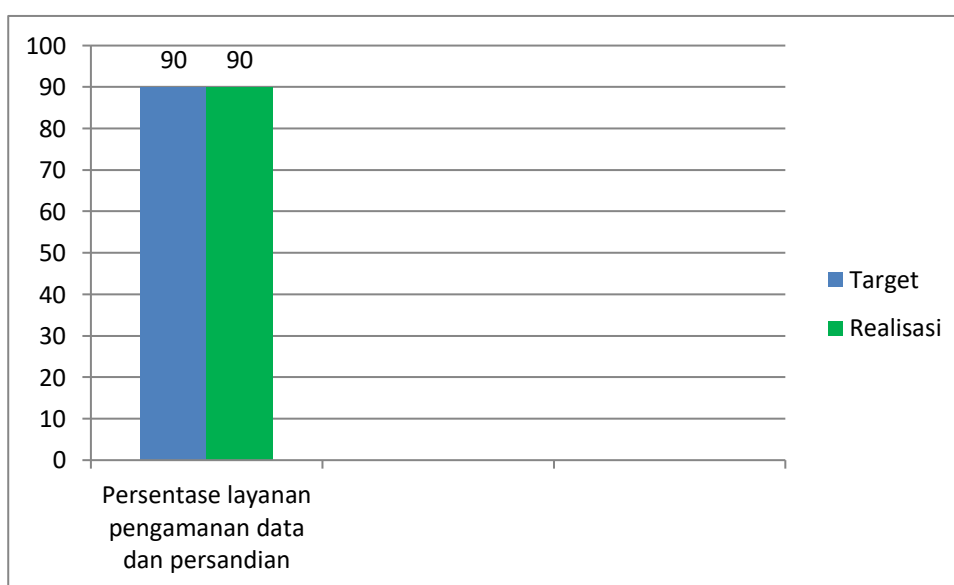
Pencapaian sasaran yang ketujuh yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Atas Sasaran Strategis 7 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%	90%	100%

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder maupun antar SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tapin, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan data dan informasi melalui beberapa media antara lain radio komunikasi, telepon, email, dan media sosial, sementara untuk berita rahasia (sandi) ditangani dan dikelola secara khusus oleh Seksi Persandian dengan menggunakan sarana dan prasarana khusus. Pada kondisi yang ada Bidang yang menangani Persandian mempunyai keterbatasan, disamping kurangnya SDM yang menangani Persandian secara khusus yang bertindak sebagai Sandiman, juga terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, karena harus membutuhkan perangkat (*hardware*) yang memadai.

Untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja Tahun 2022 ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi Bidang Persandian. Dari pencapaian diatas dapat dijelaskan bahwa SKPD telah menjalankan layanan pengamanan data dan persandian dengan baik dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan.



Grafik 6. Capaian Layanan Pengamanan Data dan Persandian

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program (outcome)	Kegiatan (output)	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot (%)	97%	96,82%	99,81%	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.545.400
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs (%)	90%	66,67%	74,1%	Program Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	410.350.000
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	2,29	76,33	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.560.000
							Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	210.450.000
								18.450.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program (outcome)	Kegiatan (output)	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (%)	100%	100%	100%	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48.200.000
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat (%)	100%	100%	100%	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000
							Layanan Hubungan Media	1.547.928.900
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.958.800
							Pelayanan Informasi Publik	29.450.000
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan (%)	90%	90%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	62.127.900
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian (%)	90%	90%	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900

3.1.2 Pengukuran Capaian Atas Kinerja Jenjang Eselon III dan IV atau Jabatan Fungsional

No (1)	Eselon (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja Sasaran (4)	Target (5)	Realisasi (6)	Capaian (7)
1	Eselon III (Sekretariat)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD (persen)	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (persen)	100%	100%	100%
			Persentase Aset yang Tercatat (persen)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100%	100%	100%
			Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Wajib Disusun (persen)	100%	100%	100%
			Hasil Evaluasi AKIP	B	BB	BB
2	Eselon IV (Sekretariat) Subbag Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang Wajib Disusun (persen)	100%	100%	100%
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
3	Eselon IV (Sekretariat) Subbag Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang Disampaikan Tepat Waktu	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	Eselon IV (Sekretariat) Subbag Umum Dan Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD	24 PNS 16 PTT	24 PNS 16 PTT	100%
			Jumlah Aset yang Tercatat	230	230	100%
5	Eselon III (Persandian Dan Statistik)	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang Disajikan (persen)	90%	90%	100%

No	Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatkan Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian (persen)	80 %	80%	100%
6	Statistisi Ahli Muda	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Buku Statistik Sektor KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicitak	210 Buku	210 Buku	100%
7	JFT. Sandiman	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Penerapan Keamanan Informasi	80 %	80%	100%
8	Eselon III (Penyelenggaraan E-Government)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E Government	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang Memiliki Izin	100 %	100%	100%
9	JFT. Pranata Komputer	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WiFi Gratis) bagi Masyarakat	4 Unit	4 Unit	100%
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di data	75 Unit	98 Unit	130,67%
10	JFT. Manggala Informatika	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jangkauan Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50%	50%	100%
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Waktu Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Bulan	12 Bulan	100%
11	JFT. Pranata Komputer	Terlaksananya Talaksana dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sub Domain)	75%	75%	100%
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Pengelolaan Teknologi Informasi (Persen)	2 Paket	2 Paket	100%

No	Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terlaksananya Tataaksana dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Domain)	75%	75%	100%
12	Eselon III (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<p>Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (Persen)</p> <p>Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (Persen)</p> <p>Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (Persen)</p> <p>Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media (Media)</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>50 Orang</p> <p>6 Media</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>60 Orang</p> <p>6 Media</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>118%</p> <p>100%</p>
13	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<p>Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten (Berita)</p> <p>Jumlah Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi Pelajar (Siswa)</p> <p>Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk</p>	<p>480 Berita</p> <p>60 Siswa</p> <p>2 KIM</p>	<p>480 Berita</p> <p>60 Siswa</p> <p>2 KIM</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

1. **Program Aplikasi Informatika**, dengan sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Insfrastruktur Teknologi dan E Government yang meliputi 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan terealisasi dengan baik 100%, melalui 2 (dua) Sub Kegiatan.
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% dari target 100% terealisasi dengan baik melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan.

2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, dengan sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Indikator dari kegiatan ini yang pertama yaitu Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%.
 2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online dengan realisasi kinerja 118% dari target 100%.
 3. Indikator yang ketiga yaitu Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media dengan capaian kinerja 100% dari target 100%.

3. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**, dengan sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah yang meliputi 1 (satu) kegiatan, antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
Diterangkan pada indikator yang menunjang kegiatan ini yaitu Persentase Layanan Data Statistik Sektor yang Disajikan dengan capaian 100% dari target 100%.

4. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, dengan sasaran Meningkatkan Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dijelaskan pada indikator kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian dengan realisasi kinerja 80% dari target 80% atau capaian 100%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Pada Subbab ini akan dijelaskan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun 2020 dalam tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Renstra 2018-2023								
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	92%	95,2%	94%	95,2%	97%	96,82%
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	-	-	70%	66,7 %	90%	66,67%
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	2	2,16	2	1,89	3	2,29
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100%	93,7%	100%	90%	100%	100%
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100 %	88 %	100 %	100 %	100%	100%
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	90%	90%
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	70%	70%	70%	70%	90%	90%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot sampai dengan tahun 2022 adalah 96,82% terealisasi dengan baik dari target 97%, artinya dari 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin sudah 122 Desa yang terkoneksi jaringan komunikasi/internet nya, selanjutnya

pada awal tahun 2023 ini sudah mulai dibangun menara BTS oleh provider Smartfren sebanyak 5 unit pada 4 Desa di Kecamatan Piani dan ini akan terus berlanjut sesuai dengan target bebas blankspot di Tahun 2023.

Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs saat ini belum dapat kita lakukan pendataan, namun bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.

Dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level 2 terealisasi dengan cukup baik dengan tingkat realisasi 1,89 (cukup) dengan capaian 94,5 % di tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 ini indeksnya naik menjadi 2,29 hasil ini berada diatas capaian tahun 2021 dengan indeks 1,89 Sehingga tren kenaikan ini akan terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti ditahun 2022 sebesar 100% dari target 100%, dibandingkan tahun 2021 sebesar 90% namun secara keseluruhan hasil ini sudah cukup baik dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat bahwa tingkat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022 adalah 100%, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 100% dan tahun 2020 yaitu 88%, Namun secara keseluruhan hasil ini sudah cukup baik.

Persentase data statistik yang disediakan selama 3 tahun terakhir meraih capaian 100%, artinya bahwa SKPD telah menjalankan layanan statistik sektoral setiap tahunnya dan melakukan perbaikan data/ update informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan data statistik sektoral yang baik.

Persentase layanan pengamanan data dan persandian pada tahun 2022 90% dan 2021 dengan capaian 100%, namun pada tahun 2020 terjadi perubahan target dan capaian yaitu 70% namun masih terealisasi dengan baik sesuai dengan target nya.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada Subbab ini kita akan melihat perbandingan realisasi dan capaian

kinerja tahun 2022 dengan target Renstra dengan melakukan perhitungan persentase perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$realisasi = \frac{realisasi\ tahun\ 2022}{target\ renstra} \times 100\%$$

Jika nilai persentase perbedaan kinerja yang diperoleh melebihi 100%, maka dapat dianggap bahwa peningkatan kinerja tahun ini dibandingkan dengan dengan target renstra adalah 100%, dapat digambarkan dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA		
			TARGET RENSTRA	TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot (%)	97%	97%	96,82%
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs(%)	90%	90%	66,67%
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	3	2,29
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (%)	100%	100%	100%
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat (%)	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang disediakan (%)	90%	90%	90%
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase layanan pengamanan data dan persandian (%)	90%	90%	90%

Dari Tabel 3.11 tersebut, dapat dilihat dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 masing-masing sampai dengan tahun 2022 terealisasi dengan baik yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

Capaian Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot sampai dengan tahun 2022 adalah 96,82% terealisasi dengan baik dari target 97%, artinya dari 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin sudah 122 Desa yang terkoneksi

jaringan komunikasi/internet nya.

Capaian Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs saat ini belum dapat kita lakukan pendataan, namun bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.

Capaian SPBE Kabupaten Tapin dari target renstra pada nilai 2 sampai dengan tahun 2021 terealisasi dengan cukup baik berada pada nilai 1,89, dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator SPBE Kemenpan untuk tahun 2022 terjadi kenaikan pada nilai 2,29 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Subbab 3.1.1.

Capaian dari Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti ditahun 2022 sebesar 100% dari target 100%, namun secara keseluruhan hasil ini sudah baik dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

Capaian dari Persentase Informasi Publik Yang Terlindungi Dari Penyalahgunaan Pemberitaan, dari target renstra 100% sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai target yang diharapkan.

Capaian dari persentase data statistik yang disediakan pada tahun 2022 dengan capaian 100% terealisasi dengan baik, dibandingkan dengan target renstra dengan capaian 90%, artinya capaian ini sudah sesuai harapan.

Capaian dari persentase layanan pengamanan data dan persandian pada tahun 2022 dengan capaian 100%, dibandingkan dengan target renstra 90% hasil ini sudah sesuai harapan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil capaian 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum sudah memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika, yang meliputi 2 (dua) kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan terealisasi dengan baik 100%, melalui 2 (dua) Sub Kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan 1 Hosting Domain yaitu *tapinkab.go.id* dengan capaian kinerja 100% dari target 75%.
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100%, meskipun demikian perangkat jaringan yang digunakan belum menggunakan sistem jaringan intra Fiber Optic (FO) memang pada tahun 2020 Dinas Kominfo sudah membangun Jaringan Fiber Optic dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Dinas Kominfo. Terhambatnya pembangunan gedung baru Kantor Diskominfo karena adanya Refocusing Anggaran Tahun 2020/2021 mengakibatkan Jaringan Fiber Optik yang sudah dibangun masih belum dapat dioperasionalkan. Namun diawal Tahun 2023 ini Dinas Kominfo sudah menempati Gedung kantor baru, didukung dengan fasilitas dan anggaran yang ada maka Jaringan Fiber Optik akan di koneksikan dan dioperasionalkan kembali untuk menjamin kelancaran akses internet.

Faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhi anggaran untuk pemeliharaan hosting domain, jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas, juga dukungan teknis tenaga IT yang dimiliki Dinas Kominfo.

- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% dari target 100% terealisasi dengan baik melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja 100% dari target 2 subdomain yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan yaitu Aplikasi SIDaK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) merupakan aplikasi yang digunakan

untuk membuat, mengedit, menyimpan, dan menginformasikan data base kepegawaian, Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi TIK.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas yaitu penyediaan jaringan internet publik (wifi gratis) bagi masyarakat kondisinya masih sama dengan tahun 2021 yaitu target kinerja 3 Jaringan yang disediakan dan terealisasi 3 jaringan atau tingkat capaian 100% dengan kinerja kegiatan 100%. Jadi belum ada penambahan jaringan internet publik. Dan pencapaian kinerja ini selain didukung oleh anggaran yang cukup untuk pemasangan jaringan internet publik, juga didukung oleh ketersediaan jaringan oleh penyedia jasa internet, dan tersedianya lokasi yang disepakati oleh Dinas Kominfo dan SKPD terkait.
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yaitu yang pertama adalah Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didata dengan target kinerja sebanyak 75 unit menara BTS dan terealisasi sebanyak 98 unit menara BTS yang didata atau capaian kinerja 130,67%, yang kedua melalui sosialisasi bimtek IT yaitu Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Pengelolaan Teknologi Informasi dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang atau capaian 100%. Faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhi anggaran untuk pemantauan atau monitoring, juga didukung oleh team work yang kompak serta schedule yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri 1 (satu) kegiatan, antara lain :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Indikator dari kegiatan ini yang pertama yaitu Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa dengan realisasi kinerja 100% melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu jumlah diseminasi informasi melalui website kabupaten dengan target 480 konten berita dari 480 konten dan informasi yang ada melalui konten berita media facebook, Instagram, dan laman *tapinkab.go.id*. atau 100% dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yaitu pembinaan pada 2 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk yaitu KIM Sumber Mutiara di desa Ketapang, Kecamatan Bakarangan dan KIM Pudarta di desa Hiyung,

Kecamatan Tapin Tengah. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain dukungan anggaran untuk kegiatan, dukungan jaringan internet yang baik untuk publikasi berita melalui media sosial, dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online dengan realisasi kinerja 100% melalui Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yaitu jumlah SDM yang paham tentang opini dan aspirasi publik dengan target 50 orang dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!. Tingkat realisasi terpenuhi sebanyak 60 orang atau capaian 118%. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah terpenuhinya dukungan anggaran untuk kegiatan, kapasitas pengelola dan penghubung/ admin SP4N-LAPORI yang cukup baik, dan kerjasama yang baik semua pihak dalam mengelola SP4N-LAPOR! yang ada dimasing-masing SKPD.
3. Indikator yang ketiga yaitu Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media dengan capaian kinerja 100% dari target 6 media yang bekerjasama dan terealisasi 6 media yaitu, media elektronik LPPL Tapin TV, media elektronik TV talkshow, media elektronik penayangan video, media massa KIM, dan media elektronik LAPOR melalui sub Kegiatan Layanan Hubungan Media yaitu yang pertama adalah realisasi waktu tayang hasil kerjasama pemerintah daerah dengan LPPL dengan target kinerja waktu tayang selama 7.350 menit dan terealisasi selama 10.000 menit atau capaian 136,1%. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini didukung oleh anggaran yang cukup untuk kegiatan dan jadwal rencana penayangan yang jelas, juga kerjasama yang baik dengan pihak LPPL Tapin TV, yang kedua jumlah media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah dengan target 2 media. Kegiatan ini terealisasi 2 media atau capaian 100%. Adapun hal yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhi anggaran untuk kegiatan, juga didukung oleh tim yang kompak dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, antara lain :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
Diterangkan pada indikator yang menunjang kegiatan ini yaitu Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang Disajikan dengan capaian 100% melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu Jumlah

Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicitak dengan target 210 buku. Tingkat realisasi terpenuhi 210 buku atau capaian 100%. Buku Statistik ini sebagai pegangan data bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhinya anggaran untuk kegiatan, juga didukung oleh kerjasama yang baik dan partisipasi dari semua pihak baik SKPD maupun instansi lainnya yang sedia memberikan data sektoral di Kabupaten Tapin.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dijelaskan pada indikator kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian dengan realisasi kinerja 80% dari target 80% atau capaian 100% melalui sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yaitu Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Penerapan Keamanan Informasi dengan target 80%. Tingkat realisasi terpenuhi 80% dari yang menerima informasi keamanan informasi dari pemberitaan Hoax, atau capaian 100%. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini yaitu terpenuhinya anggaran untuk kegiatan, team work yang kompak, jadwal yang jelas, dan kerjasama yang baik dan partisipasi dari semua pihak.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan dibantu tenaga IT yang mumpuni tetapi masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), jika dibandingkan dengan beban pekerjaan yang berat untuk saat ini maka Insentif tenaga IT yang saat ini berlaku dirasa belum sesuai, sebuah proses yang panjang yang ditempuh Dinas Kominfo supaya menjadi pertimbangan kepala daerah terhadap penyediaan tenaga IT, akhirnya pada awal tahun 2022 ini diberikan dukungan anggaran untuk tambahan Tenaga Ahli Sistem Informasi dan Teknologi Komputer untuk 4 orang yang rekrutmen nya akan difasilitasi oleh BKPSDM. Diharapkan ini akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam mendukung percepatan Transformasi Digital di Daerah.

Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika, terutama ruang kantor sangat memadai dengan sudah beroperasinya kantor baru Dinas Kominfo pada awal tahun 2022 ini, memang pada tahun 2020

Dinas Kominfo sudah membangun Jaringan Fiber Optic dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Dinas Kominfo. Akibat terhambatnya pembangunan gedung baru Kantor Diskominfo karena adanya Refocusing Anggaran Tahun 2020/2021 mengakibatkan Jaringan Fiber Optik yang sudah dibangun masih belum dapat dioperasionalkan, kemudian seiring perencanaan kedepan Dinas Kominfo harus didukung dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan data center/pusat data dan ini membutuhkan sarana penunjang yang memadai, tersedia nya ruang khusus Command Center serta perlengkapan penunjangnya antara lain kamera, layar monitor besar/videotron indoor, laptop, mixer audio, mikrofon dan lain-lain. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk mendukung pembangunan Command Center ini. Dan pada tahun 2022 sudah terealisasi pemasangan CCTV Kabupaten sebanyak 6 titik untuk mendukung kegiatan *Smart City* di Kabupaten Tapin.

Secara umum dalam rangka menunjang tugas dan fungsi berupa implementasi program/kegiatan pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan efisiensi penggunaan sumber daya berupa anggaran belanja tahun 2022 sebesar **5%** dari total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebesar **Rp. 7.852.291.836** dan terealisasi sebesar **Rp 7.459.914.003**. Hal ini dilakukan tanpa menghambat program/kegiatan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, sehingga program/kegiatan dapat terealisasi dengan baik.

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja sebagaimana seperti yang sudah di jelaskan pada subbab 3.1.5 diatas. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan/Sasaran “Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023” dengan Indikator Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot

Hasil capaian dari Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot sampai dengan tahun 2022 adalah 96,82% terealisasi dengan baik dari target 97%, artinya dari 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin sudah 122 Desa yang terkoneksi jaringan komunikasi/internet nya, selanjutnya pada awal tahun 2022 ini sudah mulai dibangun menara BTS oleh provider Smartfren pada 2 Desa di Kecamatan Hatungun dan menyusul Kecamatan Piani dengan

provider yang sama ataupun provider lainnya, dan ini akan terus berlanjut sesuai dengan target bebas blankspot di Tahun 2023, adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dari sasaran ini yaitu : **Program Aplikasi Informatika**, dengan Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang Memiliki Izin dengan capaian 100% dari target 100%, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Tujuan/Sasaran “Memastikan Area Publik Tapin Well Connected” dengan Indikator Persentase Area Publik Tapin dengan Kecepatan Interner Rata-rata 50 MBPs

Hasil capaian dari Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs saat ini belum dapat kita lakukan pendataan, namun bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik, program dan kegiatan yang mendukung dari sasaran ini yaitu : **Program Aplikasi Informatika**, meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

3. Tujuan/Sasaran “Meningkatkan Level SPBE Kabupaten” dengan Indikator Kinerja Level SPBE Kabupaten Tapin

Dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level 2 terealisasi dengan cukup baik dengan tingkat realisasi 1,89 (cukup) dengan capaian 94,5 % di tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 ini indeksnya naik menjadi 2,29 hasil ini berada diatas capaian tahun 2021 dengan indeks 1,89 Sehingga tren kenaikan ini akan terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan. Namun hasil ini masih berada dibawah capaian nasional, sehingga diharapkan kedepan layanan-layanan berbasis elektronik dapat dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit kerja / OPD maupun integrasi

dengan institusi lainnya, adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dari sasaran ini yaitu : **Program Aplikasi Informatika**, meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 untuk program ini disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1,2 dan 3 dengan Program Aplikasi Informatika Tahun 2022

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Peresentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%	96,82%	99,81%
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	90%	66,67%	74,1%
3	Meningkatkan Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3%	2,29%	76,33%
A	Program Aplikasi Informatika	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang Memiliki Izin	100%	100%	100%
A.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
A.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	100%
A.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50%	50%	100%

A.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
A.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	100%
A.2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	4 Unit	4 Unit	100%
A.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Paket	2 Paket	100%
A.2.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada masing-masing indikator kegiatan yang menunjang Program Aplikasi Informatika Tahun 2022 dibawah ini :

A. Indikator: Waktu Pemeliharaan dan Pengembangan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*tapinkab.go.id*).

Indikator ini diperoleh dari Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan 1 Hosting Domain yaitu *tapinkab.go.id* dengan capaian kinerja 100% dari target 75%. Faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhi anggaran untuk pemeliharaan hosting domain, jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas, juga dukungan teknis tenaga IT yang dimiliki Dinas Kominfo.

B. Indikator: Waktu Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (4 Km).

Indikator ini diperoleh dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan target target 12 bulan waktu pemeliharaan dan pengelolaan Sistem jaringan intra pemerintah daerah (4 km), seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya Jaringan Fiber Optic yang sudah dibangun masih belum dapat dioperasionalkan.

Namun diawal Tahun 2022 ini Dinas Kominfo sudah menempati Gedung kantor baru, didukung dengan fasilitas dan anggaran yang ada maka Jaringan Fiber Optik akan kita koneksikan dan operasionalkan.

C. Indikator: Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator ini diperoleh dari sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja 100% dari target 2 subdomain yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan yaitu Aplikasi SIDaK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengedit, menyimpan, dan menginformasikan data base kepegawaian, Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi TIK.

D. Indikator: Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI Gratis) bagi Masyarakat.

Indikator ini diperoleh dari sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan target kinerja 3 Jaringan yang disediakan dan terealisasi 3 jaringan atau tingkat capaian 100%.

E. Indikator: Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Pengelolaan Teknologi Informasi.

Indikator ini diperoleh dari sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan realisasi 40 Orang dari target 40 Orang yang ditetapkan atau capaian 100% dan Jumlah Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di Data.

F. Indikator: Jumlah Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Didata.

Indikator ini juga diperoleh dari sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan target kinerja sebanyak 75 unit menara BTS dan terealisasi sebanyak 98 unit menara BTS yang didata atau capaian kinerja 130,67%.

4. Tujuan/Sasaran “Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti” dengan Indikator Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti

Hasil capaian dari Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti sudah cukup baik dengan realisasi kinerja

100% dari target 100% dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja, adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dari sasaran ini yaitu **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

5. Tujuan/Sasaran “Meningkatkan Layanan Terhadap Informasi Publik” dengan Indikator Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat

Hasil capaian dari Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat bahwa tingkat pelayanan informasi kepada masyarakat tahun 2022 dengan capaian 100% dari target 100%, adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dari sasaran ini yaitu **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, pada 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan:

- a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Layanan Hubungan Media;
- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 untuk program ini disajikan dalam Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 4 dan 5 dengan Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%	100%	100%
B	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100%	100%	100%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
B.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50 Orang	60 Orang	118%
B.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	480 Berita	480 Berita	100%
B.1.3	Pelayanan Informasi Publik	Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	100%
B.1.4	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	7.350 Menit	10.000 Menit	136,1%
B.1.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60 Orang	60 Orang	100%
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Dibentuk	2 Kelompok	2 Kelompok	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada masing-masing indikator Sub kegiatan yang menunjang Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022 dibawah ini :

A. Indikator: Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan target 50 orang dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!. Tingkat realisasi terpenuhi sebanyak 60 orang atau capaian 118%. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah terpenuhinya dukungan anggaran untuk kegiatan, kapasitas pengelola dan penghubung/ admin SP4N-LAPORI yang cukup baik, dan kerjasama yang baik semua pihak dalam mengelola SP4N-LAPOR! yang ada dimasing-masing SKPD.

B. Indikator : Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 480 berita. Tingkat realisasi terpenuhi 480 berita atau capaian 100%. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain dukungan anggaran untuk kegiatan, dukungan jaringan internet yang baik untuk publikasi berita melalui media sosial, dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

C. Indikator: Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan target 2 Kelompok. Tingkat realisasi terpenuhi 2 kelompok atau capaian 100% yaitu Pembentukan / Pembinaan pada KIM di Desa Ketapang, Kecamatan Bakarangan dan di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Dan Untuk Kegiatan Jurnalistik Pelajar dengan Target 60 Orang dan terealisasi sebanyak 60 Orang atau capaian 100%. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adanya anggaran yang cukup dan jadwal yang jelas untuk kegiatan, juga didukung oleh kerjasama yang baik dan partisipasi peran dari masyarakat.

D. Indikator: Terlaksananya Layanan Hubungan Media

Indikator ini diperoleh dari Sub kegiatan Layanan Hubungan Media Kemitraan Informasi Melalui LPPL dengan target kinerja waktu tayang selama 7.350 menit dan terealisasi selama 10.000 menit atau capaian 136,1%. Capaian ini didukung oleh anggaran yang cukup untuk kegiatan dan jadwal rencana penayangan yang jelas, juga kerjasama yang baik dengan pihak LPPL Tapin TV.

E. Indikator : Waktu Pelayanan Informasi Publik

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Layanan Hubungan Media terhadap penyebarluasan informasi melalui media online dengan target 2 media. Kegiatan ini terealisasi 2 media atau capaian 100% yaitu media iklan untuk ucapan HUT Kabupaten Tapin Ke 57 Tahun 2022 dan tayangan publikasi pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 1 Tahun. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhi anggaran untuk kegiatan, juga didukung oleh tim yang kompak dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

6. Tujuan/Sasaran “Meningkatkan Layanan Statistik Sektor” dengan Indikator Kinerja Persentase Data Statistik yang Disediakan

Hasil capaian dari persentase data statistik yang disediakan pada tahun 2022 dengan capaian 100% dan realisasi 90% dari target 90%, artinya capaian ini sudah sesuai harapan dan bahwa SKPD telah menjalankan layanan statistik sektoral setiap tahunnya dan melakukan perbaikan data/ update informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan data statistik sektoral yang baik didukung melalui **Program Penyelenggaraan Statistik**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota pada sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral .

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 untuk program ini disajikan dalam Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 6 dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
6	Meningkatkan Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%	90%	100%
C	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang Disajikan	90%	90%	100%
C.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, Ekonomi Makro Yang dicetak	100%	100%	100%
C.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	210 Buku	210 Buku	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada indikator Sub kegiatan yang menunjang Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022 dibawah ini :

Indikator : Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicetak

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan penyediaan Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicetak dengan target 210 buku. Tingkat realisasi terpenuhi 210 buku atau capaian 100%. Buku Statistik ini sebagai pegangan data bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini selain terpenuhinya anggaran untuk kegiatan, juga didukung oleh kerjasama yang baik dan partisipasi dari semua pihak baik SKPD maupun instansi lainnya yang sedia memberikan data sektoral di Kabupaten Tapin.

7. Tujuan/Sasaran “Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian” dengan Indikator Kinerja Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian

Untuk memperlancar pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder maupun antar SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tapin, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan data dan informasi melalui beberapa media antara lain radio komunikasi, telepon, email, dan media sosial, sementara untuk berita rahasia (sandi) ditangani dan dikelola secara khusus oleh Seksi Persandian dengan menggunakan sarana dan prasarana khusus. Pada kondisi yang ada Bidang yang menangani Persandian mempunyai keterbatasan, disamping kurangnya SDM yang menangani Persandian secara khusus yang bertindak sebagai Sandiman, juga terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, karena harus membutuhkan perangkat (*hardware*) yang memadai.

Hasil capaian dari persentase layanan pengamanan data dan persandian pada tahun 2022 dengan capaian 100% dan realisasi 90% dari target 90%, hasil ini sudah sesuai harapan. Untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja Tahun 2022 ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 untuk program ini disajikan dalam Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 7 dengan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2022		Capaian
			Target	Realisasi	
7	Meningkatkan Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%	90%	100 %
D	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	80%	80%	100%
D.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	80%	100%

D.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Waktu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100%
-------	--	--	----------	----------	------

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada indikator Sub kegiatan yang menunjang Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022 dibawah ini :

Indikator : Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator ini diperoleh melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Sosialisasi Keamanan Informasi Bidang Persandian dengan target 12 Bulan. Tingkat realisasi terpenuhi 12 Bulan dari yang menerima informasi keamanan informasi dari pemberitaan Hoax, atau capaian 100%. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja ini yaitu terpenuhinya anggaran untuk kegiatan, team work yang kompak, jadwal yang jelas, dan kerjasama yang baik dan partisipasi dari semua pihak.

3.1.8 Perbandingan Capaian Atas IKU Level SPBE Tahun Ini Dengan Capaian Level SPBE Nasional

Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level 2 terealisasi dengan cukup baik dengan tingkat realisasi 1,89 (cukup) dengan capaian 94,5 % di tahun 2021, tetapi pada tahun 2022 ini indeksnya naik menjadi 2,29 hasil ini berada diatas capaian tahun 2021 dengan indeks 1,89 Sehingga tren kenaikan ini akan terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional Tahun 2022 mencapai level 2,34 artinya capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin masih berada dibawah Indeks Nasional.

Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin telah mempersiapkan infrastruktur SPBE dengan baik, terutama pada domain Kebijakan dengan Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi, Kebijakan Internal Layanan Pengadaan, K.I. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, demikian juga Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE, Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik.

Kedepannya layanan-layanan berbasis elektronik dapat dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit kerja / OPD maupun integrasi dengan institusi lainnya. Perbaikan SPBE ke depannya terutama terkait domain tata kelola, yaitu Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah, Anggaran dan Belanja TIK, Pengoperasian Pusat Data, Integrasi Sistem Aplikasi, serta Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, Layanan Naskah Dinas. Layanan yang belum berjalan dengan baik adalah Layanan Whistle Blowing System.

3.2 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022, pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.

1. Pendapatan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi menara BTS pada periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 145.827.000 dengan capaian 112,17% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp.130.000.000.

2. Belanja Operasi

Untuk Tahun Anggaran 2022 Dinas Kominfo Kab. Tapin khususnya pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga Realisasi Belanja secara keseluruhan pada periode 01 Januari s/d 31

Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.459.914.003 dengan capaian 95,00% dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 7.852.291.836.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ Kurang	(%)
1	Pendapatan LRA	130.000.000	145.827.000	15.827.000	112,17
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	130.000.000	145.827.000	15.827.000	112,17
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	130.000.000	145.827.000	15.827.000	112,17
2	Belanja	7.852.291.836	7.459.914.003	(392.377.833)	95,00
2.1	Belanja Operasi	7.195.129.956	6.810.272.503	(384.857.453)	94,65
2.1.1	Belanja Pegawai	3.432.001.856	3.104.248.126	(327.753.730)	90,45
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.306.631.200	3.249.527.477	(57.103.723)	98,27
2.1.3	Belanja Hibah	456.496.900	456.496.900	0	100
2.2.	Belanja Modal	657.161.880	649.641.500	(7.520.380)	98,86
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.161.880	649.641.500	(7.520.380)	98,86
Surplus/ (Defisit)		(7.722.291.836)	(7.314.087.003)	408.204.833	94,71

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.102.718.126 dengan capaian 90,52% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.427.576.856. Masing-masing sub pos anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.233.976.778	1.216.657.921	17.318.857	98,60
2	Tunjangan Keluarga	128.093.644	122.318.940	5.774.704	95,49
3	Tunjangan Jabatan	209.990.000	152.660.100	57.329.900	72,70
4	Tunjangan Fungsional	6.300.000	6.300.000	0	100
5	Tunjangan Fungsional Umum	26.440.000	26.330.000	110.000	99,58
6	Tunjangan Beras	75.599.238	73.433.880	2.165.358	97,14
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.177.196	6.406.375	2.770.821	69,81
8	Pembulatan Gaji	1.000.000	17.728	982.272	1,77

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.272.850.000	1.272.850.000	0	100
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.327.958	28.742.281	36.585.677	44,00
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	398.822.042	197.000.901	201.821.141	49,40
Jumlah		3.427.576.856	3.102.718.126	324.858.730	90,52

b) Belanja Barang dan Jasa

Untuk Tahun Anggaran 2022 Dinas Kominfo Kab. Tapin khususnya pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 tidak mendapatkan tambahan anggaran sehingga realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.906.012.377 dengan capaian 98,56% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.963.128.100 Masing-masing uraian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.000.000	199.988.000	12.000	99,99
2	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.245.000	6.226.000	19.000	99,70
3	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	23.343.000	23.246.876	96.124	99,59
4	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.136.000	7.080.000	56.000	99,22
5	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	8.468.400	8.468.000	400	99,99
6	Belanja Alat Tulis Kantor	23.662.700	22.266.700	1.396.000	94,10
7	Belanja Kertas dan Cover	19.136.700	16.688.400	2.448.300	87,21
8	Belanja Bahan Cetak	133.363.800	128.596.300	4.767.500	96,43
9	Belanja Benda Pos	3.897.600	2.984.000	913.600	76,56
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0	0
11	Belanja Alat Listrik	7.031.000	7.027.000	4.000	99,94
12	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.540.900	8.538.500	2400	99,97
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.160.000	66.160.000	3.000.000	95,66
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.840.000	5.840.000	0	100
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91.000.000	88.225.000	2.775.000	96,95

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9.900.000	9.900.000	0	100
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.800.000	4.800.000	0	100
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	191.700.000	188.100.000	3.600.000	98,12
19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	113.700.000	111.300.000	2.400.000	97,89
20	Belanja Perlengkapan Dinas	2.000.000	2.000.000	0	100
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000	0	100
22	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.900.000	14.900.000	0	100
23	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.400.000	7.375.000	25.000	99,66
24	Belanja Jasa Tata Rias	8.000.000	8.000.000	0	100
25	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	30.000.000	29.958.000	42.000	99,86
26	Belanja Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	95.000.000	94.890.000	110.000	99,88
27	Belanja Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	1.078.600.000	1.078.600.000	0	100
28	Belanja Tagihan Air	4.800.000	2.101.500	2.698.500	43,78
29	Belanja Tagihan Listrik	54.900.000	50.617.460	4.282.540	92,20
30	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	88.410.000	69.785.215	18.624.785	78,93
31	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.400.000	2.192.300	1.207.700	64,48
32	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	184.000.000	175.567.426	8.432.574	95,42
33	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000	4.500.000	0	100
34	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	15.000.000	15.000.000	0	100
35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.000.000	4.000.000	0	100
36	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	456.496.900	456.496.900	0	100
37	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	684.658.000	684.655.800	2.200	99,99
38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.175.000	32.175.000	0	100
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
40	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	6.500.000	6.500.000	0	100
41	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	137.150.000	137.150.000	0	100
42	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000	99.800.000	200.000	99,80
43	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0	0	0
44	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya	6.313.100	6.313.000	100	99,99
Jumlah		3.963.128.100	3.906.012.377	57.115.723	98,56

c) Belanja Modal

Untuk Tahun 2022 terdapat penambahan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu Pengadaan Personal Komputer berupa Laptop dan Printer untuk keperluan di Sekretariat dan di Bidang Penyelenggaraan E-government serta Pengadaan Meubelier dan Alat Pendingin Ruangan untuk pemenuhan kebutuhan Kantor Baru Dinas Kominfo Kab. Tapin serta Pembelian Alat Komunikasi Digital berupa Handy Talky untuk Bidang Statistik dan Persandian dengan Realisasi anggaran Belanja Modal periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 451.183.500 dengan capaian sebesar 97,75% dari pagu anggaran sebesar Rp. 461.586.880. Masing-masing uraian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	(%)
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.425.000	1.530.000	2.895.000	34,58
2	Belanja Modal Alat Pendingin	5.074.200	5.074.000	200	99,99
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.375.000	98.977.500	7.397.500	93,05
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	43.500.000	43.500.000	0	100
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	59.900.000	59.850.000	50.000	99,92
6	Belanja Modal Komputer Jaringan	114.382.680	114.382.000	680	100
7	Belanja Modal Personal Computer	38.930.000	38.930.000	0	100
8	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	89.000.000	88.940.000	60.000	99,93
Jumlah		461.586.880	451.183.500	10.403.380	97,75

3. Belanja Langsung

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun anggaran 2022, pelaksanaan

program/kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin. Realisasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3.20
Capaian dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	10.848.000	1.752.000	86,10
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000	10.848.000	1.752.000	86,10
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.176.856	3.105.718.126	325.458.730	90,51
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.576.856	3.102.718.126	324.858.730	90,52
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000	1.750.000	300.000	85,37
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000	1.250.000	300.000	80,65
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.467.700	891.328.400	139.300	99,98
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.829.800	36.825.100	4.700	99,99
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.401.900	76.376.500	25.400	99,97
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.300.000	26.256.000	44.000	99,83
3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.903.000	5.840.000	63.000	98,93
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	746.033.000	746.030.800	2.200	99,99
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.586.880	451.183.500	10.403.380	97,75
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	461.586.880	451.183.500	10.403.380	97,75
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.927.000	279.067.784	13.859.216	95,27
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.531.000	109.271.784	10.259.216	91,42
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.396.000	169.796.000	3.600.000	97,92
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.644.500	67.238.176	1.406.324	97,95
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.524.500	44.220.176	1.304.324	97,13
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000	4.375.000	25.000	99,43
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	18.720.000	18.643.000	77.000	99,59
7	Pengelolaan Informasi dan	1.671.137.700	1.671.006.900	130.800	99,99

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota				
7.1	Pelayanan Informasi Publik	29.450.000	29.450.000	0	100,00
7.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48.200.000	48.200.000	0	100
7.3	Layanan Hubungan Media	1.547.928.900	1.547.896.900	32.000	99,99
7.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000	12.600.000	0	100
7.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	32.958.800	32.860.000	98.800	99,70
8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	625.350.000	605.906.895	19.443.105	96,89
8.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000	204.567.426	10.432.574	95,15
8.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	410.350.000	401.339.469	9.010.531	97,80
9	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	296.005.400	279.384.422	16.620.978	94,38
9.1	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	210.450.000	207.940.000	2.510.000	98,81
9.2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	31.560.000	24.965.922	6.594.078	79,11
9.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi Infomasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.545.400	28.066.000	7.479.400	78,96
9.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	18.450.000	18.412.500	37.500	99,80
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62.127.900	62.127.900	0	100
10.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	62.127.900	62.127.900	0	100
11	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.267.900	36.103.900	3.164.000	91,94
11.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900	36.103.900	3.164.000	91,94
JUMLAH		7.852.291.836	7.459.914.003	389.214.792	95,00

Dari Tabel 3.20 diatas terlihat bahwa dari total anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yaitu sebesar **Rp. 7.852.291.836**, yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 7.459.914.003** atau **95,00%** yang terealisasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas kinerja yang telah dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Tapin yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan. Anggaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2022 dalam APBD Kabupaten Tapin ditetapkan sebesar **Rp. 7.852.291.836**, yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 7.459.914.003** atau **95,00%** yang terealisasi. Dari capaian kinerja tersebut, persentase efisiensi anggaran sebanyak **5%**.

Berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 yang didukung Program Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika yang pertama dalam pencapaian Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot sampai dengan tahun 2022 adalah 96,82% terealisasi dengan baik dari target 97%, artinya dari 126 Desa yang ada di Kabupaten Tapin sudah 122 Desa yang terkoneksi jaringan komunikasi/internet nya, yang kedua Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs saat ini belum dapat kita lakukan pendataan, namun bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik, yang ketiga Indeks Level SPBE Kabupaten Tapin dari target SPBE Kabupaten Tapin di Level 3 terealisasi dengan cukup baik dengan tingkat realisasi 2,29 (cukup) dengan capaian 76,33 % di tahun 2022.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik yang pertama pada pencapaian Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan ditindak lanjuti ditahun 2022 sebesar 100% dari target 100% sudah cukup baik dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja, yang kedua Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat tahun 2022 adalah 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada layanan penyediaan statistik sectorial terealisasi 100% tercapai dengan baik dan dilakukan upaya perbaikan data/ update informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan data statistik sectorial yang baik.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terakhir yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun 2022 dengan capaian 100% terealisasi dengan baik sesuai dengan target nya namun pada Subbidang Persandian sendiri masih mempunyai keterbatasan, disamping kurangnya SDM yang menangani Persandian secara khusus yang bertindak sebagai Sandiman, juga terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, karena harus membutuhkan perangkat (hardware) yang memadai.

Secara keseluruhan setelah dilakukan Analisa pencapaian Pengukuran Kinerja pada Capaian Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dihitung berdasarkan hasil rata-rata dari seluruh Persentase capaian setiap Indikator Kinerja Utama dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata kinerja} = \frac{\text{Capaian Sasaran } 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7 \text{ Sasaran}}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sebesar 92,89% dengan kategori “B” atau Baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, Namun dalam analisa tersebut masih perlu untuk dilakukan Evaluasi sebagai upaya perbaikan terhadap pelaporan.

4.2 Saran

Dalam rangka upaya peningkatan berkelanjutan bagi kemajuan pembangunan daerah dan instansi pemerintah terutama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya di masa – masa mendatang, maka dapat disarankan beberapa hal :

- 1) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi E-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Tapin.
- 2) Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT.
- 4) Meningkatkan komitmen bersama pada semua tingkatan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022 kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf dan akan kami lakukan perbaikan agar menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

LHE AKIP TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

I N S P E K T O R A T

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(AKIP) TAHUN 2021

Nomor 700/Reg/091/AKIP/Wil.III/VIII/NSP/2022
Tanggal 25 Agustus 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/Reg/091/AKIP/Wil.III/VIII/INSP/2022

25 Agustus 2022

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**
di
Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai **70,15** atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot 2020	Nilai 2020	Bobot 2021	Nilai 2021
a. Perencanaan Kinerja	30	28,40	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	25	20,63	30	21,60
c. Pelaporan Kinerja	15	13,56	15	10,95
d. Evaluasi Internal	10	8,29	25	13,00
e. Capaian Kinerja	20	15,19		
Nilai Hasil Evaluasi	100	86,07	100	70,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		BB

Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan penetapan target yang dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, namun masih belum menggambarkan keterlibatan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
3. Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja internal sehingga pengukuran kinerja belum memenuhi standar;
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
5. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena belum terdapat bukti nyata Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
6. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, namun data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
7. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sehingga belum optimal dalam memicu perbaikan kinerja;
8. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sehingga setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

9. Dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kinerja, namun belum direviu secara internal;
10. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya karena belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;
11. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja;
12. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih berupa evaluasi program dan evaluasi rencana aksi;
13. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar karena belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
14. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya dan pendalaman yang memadai;
15. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
16. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan membuat analisis pendekatan penetapan target;
2. Melibatkan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat perencanaan kinerja;
3. Memenuhi standar dalam pengukuran kinerja dengan membuat pedoman teknis pengukuran kinerja internal (minimal SOP);
4. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan dengan membuat pedoman/SOP jika terjadi kesalahan data;
5. Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pengukuran kinerja;

6. Menyempurnakan pengukuran capaian kinerja dengan membuat analisis relevansi dan kecukupan data kinerja;
7. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;
8. Menjadikan pencapaian kinerja dalam pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan setiap pegawai;
9. Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja;
10. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai perhatian utama Pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, minimal terdapat absensi dan notulen rapat pelaporan kinerja;
11. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
12. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja;
13. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, minimal sop evaluasi kinerja internal;
14. Meningkatkan kompetensi evaluator internal dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendokumentasikan kertas kerja evaluasi sebagai bukti nyata dari kedalaman evaluasi;
15. Menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
16. Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai langkah nyata dalam implementasi SAKIP.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Inspektur,

Unda Absori, SH.MH

Pembina Tk.I

NIP.19700722 200501 1 013

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. 01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
Rantau



kominfo@tapinkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 30.a TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan

melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Dinas dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 05 Agustus 2022



H.M. Tamberin, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630210 198603 1 028

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin
Nomor : 30.a Tahun 2022
Tanggal : 05 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
6	Anggota	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
7	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
8	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Anggota	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat
10	Anggota	JFT. Sandiman Ahli Muda
11	Anggota	JFT. Statistisi Ahli Muda
12	Anggota	JFT. Pranata Komputer Ahli Muda
13	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Tapin,
DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

H.M. Damberin, S.Sos, MM
Pemrina Utama Muda
NIP. 19630210 198603 1 028

JKU



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. Di
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfortapin@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 22.a TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Januari 2022



Kepala Dinas,

H. M. TAMBERIN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630210 198603 1 028

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 22.a Tahun 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

No	SASARAN STRATEGIS	URAIAN	INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKTOR	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspt di Tahun 2023	Terpenuhinya Seluruh Tapin Bebas Blankspt di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspt (%)	Masih ada Blankspt di beberapa desa	Jumlah Desa Bebas Blankspt x 100% Jumlah Desa	Bidang Pelayanan E Government
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Terpenuhinya Area Publik Tapin Internetnya tanpa terputus	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS	Masih belum meratanya Kecepatan internet di beberapa Area Publik	Jumlah Area Publik dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS x 100% Jumlah Area Publik	Bidang Pelayanan E Government
3	Meningkatkannya level SPBE Kabupaten	Meningkatkan level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	Belum sepenuhnya SKPD menerapkan SPBE	Level SPBE Kabupaten	Bidang Pelayanan E Government
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti (%)	Masih ada aduan masyarakat yang belum Respons Time	Jumlah Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Ditindak Lanjuti Sebelum 5 Hari Kerja x 100% Jumlah Jumlah Aduan Masyarakat Terverifikasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	Meningkatkan Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat (%)	Belum semua masyarakat menerima Layanan pemberitaan	Jumlah Informasi yang di Publikasikan x 100% Jumlah Target Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

6	Meningkatnya layanan statistik sektoral	Meningkatkan layanan statistik sektoral	Persentase data statistik yang disediakan (%)	Data statistik sektoral diperlukan sebagai data dukung pembangunan	Jumlah data Statistik Sektoral yang adax 100% Jumlah data Statistik Sektoral yang dikerjakan	Bidang Persandian dan Statistik
7	Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian	Meningkatkan layanan pengamanan data dan persandian	Persentase layanan pengamanan data dan persandian (%)	Jumlah informasi dari pemerintah daerah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan dan pengamanan data	Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankanx 100% Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan	Bidang Persandian dan Statistik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. Tamberin, S.SoS, MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs H. M. Arifin Arpan, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Rantau, 17 Januari 2022
Pihak Pertama

H.M. Tamberin, S.Sos, MM

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS	90%
3	Meningkatnya Level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3
4	Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time yang Ditindak Lanjuti	100%
5	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100%
6	Meningkatnya Layanan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang Disediakan	90%
7	Meningkatnya Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	90%

No	Program	Anggaran :	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,907,706,600	Eselon III
2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 1,219,640,800	Eselon III
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 619,855,400	Eselon III
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 67,117,990	Eselon III
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 39,267,900	Eselon III

Rantau, 17 Januari 2022


 Bupati Tapin,

 Drs. H. M. Arifin Arpan, MM


 Kepala Dinas

 H.M. Tamberin, S.Sos, MM
 NIP. 19630210 198603 1 028

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. Tamberin, S.SoS, MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Pihak Pertama

Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD (persen)	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik (persen)	100%
		Persentase Aset yang Tercatat (persen)	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Wajib Disusun (persen)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	B
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang Wajib Disusun (persen)	100%

Program
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 4,907,706,600

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Dinas,



H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Sekretaris



Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Setiawan Marwan, SE
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

Pihak Pertama

Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	10 Dokumen

Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran :
Rp. 12,600,000

Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris,



Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan



Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan, SE

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Setiawan Marwan, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

Pihak Pertama

Muhammad Ikhsan, SE
NIP. 19881122 201903 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
 Nama Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan anggaran program dan rencana kegiatan Dinas	Jumlah bahan dan menyusun dokumen perencanaan anggaran program dan rencana kegiatan Dinas	1 Dokumen
2	Terlaksananya membantu menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Komunikasi dan Informatika	1 Tahun
3	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang terintegrasi	Jumlah bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang terintegrasi	4 Laporan
4	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah bahan dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	4 Laporan
5	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas	Jumlah bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas	3 Laporan
6	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah bahan dan menyusun Laporan Kinerja Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	4 Laporan

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terlaksananya melaksanakan tugas lainnya sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah melaksanakan tugas lainnya sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

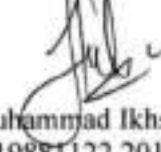
Rantau, 17 Januari 2022

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan



Muhammad Ikhsan, SE
NIP. 19881122 201903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Hasanah, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Pertama

Noor Hasanah, S.Sos
NIP. 19760817 201101 1 006


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Pengurusan Administrasi Kepegawaian ASN SKPD	24 PNS 16 PTT
		Jumlah Aset yang Tercatat	230


Kegiatan	Anggaran :
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 733,582,000
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 412,512,680
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 251,331,000
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 66,504,500

Sekretaris,


Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

Rantau, 17 Januari 2022

Kasubbag Umum dan Kepegawaian


Noor Hasnah, S.Sos
NIP. 19760817 201101 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004

Pihak Pertama

Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
NIP. 19760605 200701 2 040

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
Tahun Anggaran : 2021


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang Disampaikan Tepat Waktu	3 Laporan

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran : Rp. 3,431,176,420

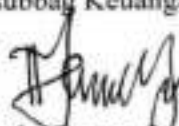
Rantau, 17 Januari 2022

Sekretaris,

Kasubbag Keuangan



Ir. Hj. Gusti Kamariah, MMA
NIP. 19650214 199303 2 004



Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
NIP. 19760605 200701 2 040

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul Jannah, SST

Jabatan : Penata Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
NIP. 19760605 200701 2 040

Pihak Pertama

Fathul Jannah, SST
NIP. 19960603 201903 2 003

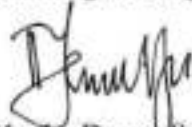
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
 Nama Jabatan : Penata Keuangan
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan	Jumlah bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan	1 Naskah
2	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan	Jumlah bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan	1 Naskah
3	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran	Jumlah bahan pengesahan dokumen anggaran	1 Naskah
4	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan membantu mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi	Jumlah bahan dan membantu mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi	1 Naskah
5	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan membantu memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah bahan dan membantu memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	6 Laporan
6	Terlaksananya membantu dalam menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah bahan dan menyusun laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan	1 Laporan
7	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Kasubbag Keuangan,



Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
 NIP. 19760605 200701 2 040

Penata Keuangan



Fathul Jannah, SST
 NIP. 19960603 201903 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Faisal, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. Tamberin, S.SOS, MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Pihak Pertama

Umar Faisal, S. Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (Persen)	100 %
		Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (Persen)	100 %
		Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (Persen)	100 %
		Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media (Media)	6 Media

Program
1 Program Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran :
Rp. 1,219,640,800

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Dinas,



H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Umar Faisal S. Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Hernilda, SP
Jabatan : Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umar Faisal, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pihak Pertama

Riska Hernilda, SP
NIP. 19800517 200604 2 015

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten (Berita)	480 Berita
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi Pelajar (Siswa)	60 Siswa
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	1 KIM

Kegiatan
1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran :
Rp 45,558,800

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat



Riska Hernilda, SP
NIP. 19800517 200604 2 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Karno Rayadi, S.Sos

Jabatan : Pengelola Media Center dan Kemitraan Media

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umar Faisal, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

M. Karno Rayadi, S.Sos
NIP. 19830615 201001 1 019

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Unit Kerja : ---
 Nama Jabatan : Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Persentase Peningkatan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	15 konsep
2	Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis, dan Menyajikan Data Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Persentase Terkumpulnya Data Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	12 Berkas
3	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Tersusunnya Buku Panduan Pengelolaan Komunikasi Publik	15 konsep
4	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	833 Menit
5	Menyiapkan bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Hubungan dengan Media dan Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah	Persentase Berita yang Dipublikasi	833 Menit
6	Menyiapkan Bahan dan Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Melakukan Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia	Persentase Kunjungan ke Komisi Penyiaran Indonesia	6 Kunjungan
7	Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media dalam Pencapaian Informasi Pembangunan	Persentase Pertemuan dengan Media dalam Pencapaian Informasi Pembangunan	12 Kunjungan
8	Melakukan Penguatan Hubungan Kemitraan Asosiasi Profesi dan Hubungan Media	Persentase Pertemuan dengan Media dan Masyarakat Pegiat Media	12 Kunjungan

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Menyiapkan Bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Persentase Terkumpulnya Bahan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	12 berkas

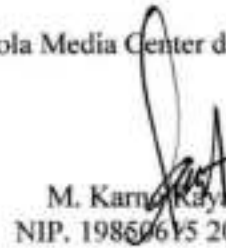
Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media



M. Karno Kayadi, S.Sos
NIP. 19850615 201001 1 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warniati
Jabatan : Pengelola TV dan Radio
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umar Faisal, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umar Faisal', written over a horizontal line.

Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pihak Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Warniati', written over a horizontal line.

Warniati
NIP. 19701014 200604 2 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Unit Kerja : —
 Nama Jabatan : Pengelola TV dan Radio
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan informasi publik dan hubungan media	Jumlah bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan informasi publik dan hubungan media	15 konsep
2	Terlaksananya membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data layanan informasi publik dan hubungan media	Jumlah data layanan informasi publik dan hubungan media	12 Berkas
3	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis layanan informasi publik dan hubungan media	Jumlah bahan dan menyusun petunjuk teknis layanan informasi publik dan hubungan media	15 konsep
4	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan	833 menit
5	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah	Jumlah bahan dan melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media dan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah	833 menit
6	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi Kalimantan selatan dan melakukan koordinasi dengan komisi penyiaran Indonesia	Jumlah bahan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan komisi penyiaran Indonesia daerah provinsi Kalimantan selatan dan melakukan koordinasi dengan komisi penyiaran Indonesia	6 Kunjungan
7	Terlaksananya membantu melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media dalam pencapaian informasi pembangunan	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik dan hubungan media dalam pencapaian informasi pembangunan	12 Kunjungan

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Terlaksananya membantu melakukan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi dan hubungan media	Jumlah penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi dan hubungan media	12 Kunjungan
9	Terlaksananya Membantu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media	Jumlah bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media	12 berkas
10	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja layanan informasi publik dan hubungan media	Jumlah bahan dan menyusun laporan kinerja layanan informasi publik dan hubungan media	12 berkas
11	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pengelola TV dan Radio



Warniati
NIP. 19701014 200604 2 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Krisnawati, ST

Jabatan : Analis Berita

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umar Faisal, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Pihak Pertama

Rika Krisnawati, ST
NIP. 19830828 200701 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Unit Kerja : ---
 Nama Jabatan : Analis Berita
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	12 konsep
2	Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis, dan Menyajikan Data Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase terkumpulnya Data Pengelolaan Komunikasi Publik terkait Publikasi	12 Berkas
3	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi Publik	Tersusunnya Buku Panduan Pengelolaan Komunikasi Publik	15 konsep
4	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Layanan Perencanaan Komunikasi Publik dan Citra Positif Pemerintah Daerah	Persentase Penyebaran Konten Pemerintah Melalui Media Elektronik	50 Orang
5	Menyiapkan bahan dan Melaksanakan Monitoring Isu Publik di Media (Media Massa dan Sosial), Pengumpulan Pendapat Umum (Survey dan Jejak Pendapat) serta Pengolahan Aduan Masyarakat	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan dan Opini Terhadap Berita	100 Aduan
6	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik Pemerintah Daerah / Media Internal	Persentase Berita yang Dipublikasi	3 Media
7	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi Bagi Media dan Lembaga Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan SDM dan Sarana untuk Publikasi	12 Kunjungan
8	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik Daerah	Persentase Informasi Publik Yang terlindungi dari Penyalahgunaan	12 Kunjungan
9	Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase layanan Pengaduan Masyarakat secara Elektronik	24 berkas

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Menyiapkan Bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Komunikasi Publik	Indeks Keberhasilan Kepuasan dalam Pengelolaan Komunikasi Publik Penunjang Rencana Aksi	12 berkas
11	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pengelolaan Komunikasi Publik	Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Rencana Kerja	12 berkas
12	Membantu Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengemasan Ulang Konten Nasional Menjadi Konten Lokal dan Pembuatan Konten Lokal	Persentase Update Berita di Media Massa dan Media Sosial	288 Berita
13	Membantu Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Untuk Mendukung Komunikasi Publik Lintas Sektorial Lingkup Nasional dan Daerah	Persentase Terpenuhinya Data Dukung Penyeberluasan Informasi	288 Berita
14	Membantu Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pemantauan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target waktu yang Ditetapkan**	50 Orang
15	Melaksanakan Tugas lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya	Persentase Penyelesaian Penugasan / Direktif Pimpinan Sesuai Target waktu yang Ditetapkan**	1 Kegiatan

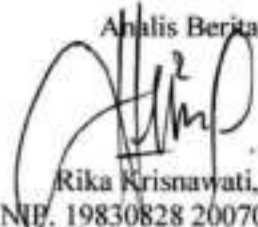
Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
NIP. 19680618 198803 1 006

Analisis Berita



Rika Krisnawati, ST
NIP. 19830828 200701 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin, S.AP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. Tamberin, S.SOS, MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Pertama

Nurdin, S.AP, MM
NIP. 19650530 198603 1 010

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang Disajikan (persen)	100%
2	Meningkatkan Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian (persen)	80 %

Program	Anggaran :
1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 67,117,900
2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 39,267,900


Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Dinas,



H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Kepala Bidang Persandian dan Statistik



Nurwin, S.AP, MM
NIP. 19650630 198603 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubai Dullah, SE

Jabatan : Fungsional Stastisi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurdin, S.AP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nurdin, S.AP, MM
NIP. 19650630 198603 1 010

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Pertama

Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**


Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Stastisi
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicetak	140 buah

Kegiatan :
1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran :
Rp. 67,117,900

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,


Nurdin, S.AP MM
NIP. 19650630 198603 1 010

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Stastisi


Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Siaga Wanto, S.Mat

Jabatan : Statistisi Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ubai Dullah, SE

Jabatan : Fungsional Statistisi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

Pihak Pertama

Dwi Siaga Wanto, S.Mat
NIP. 19940223 201903 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
 Unit Kerja : Jabatan Fungsional Statistisi
 Nama Jabatan : Statistisi Ahli Pertama
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya mengumpulkan bahan/informasi pendukung untuk Kegiatan Statistik	Jumlah bahan/informasi pendukung untuk Kegiatan Statistik	1 Bahan Acuan
2	Terlaksananya membuat Rencana Tabulasi Kegiatan Statistik	Jumlah Rencana Tabulasi Kegiatan Statistik	60 Dummy Tabel
3	Terlaksananya Mengikuti Pembahasan Kuesioner dan Instrumen lainnya pada Kegiatan Statistik	Jumlah Mengikuti Pembahasan Kuesioner dan Instrumen lainnya pada Kegiatan Statistik	2 Pertemuan
4	Terlaksananya Mengikuti Pembahasan Penyusunan Pedoman Kegiatan Statistik	Jumlah Mengikuti Pembahasan Penyusunan Pedoman Kegiatan Statistik	2 Pertemuan
5	Terlaksananya kegiatan dalam lingkup observasi – Penentuan metode penarikan sampel	Jumlah observasi – Penentuan metode penarikan sampel	2 Metode
6	Terlaksananya mengikuti pelatihan pengumpulan data	Waktu mengikuti pelatihan pengumpulan data	4 Jam
7	Terlaksananya melakukan pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	Jumlah pengumpulan data pada kegiatan statistik objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	60 Objek
8	Terlaksananya melakukan pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	Jumlah pengawasan pada kegiatan statistik objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	60 Objek
9	Terlaksananya melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	Jumlah pemeriksaan hasil pengumpulan data objek non rumah tangga (Sektoral) – Kuesioner Sederhana	60 Objek
10	Terlaksananya melakukan penyuntingan (editing), hasil kegiatan in depth review	Jumlah penyuntingan (editing), hasil kegiatan in depth review	60 Halaman
11	Terlaksananya melakukan reformat data sensus/survei dari satu format ke format yang lainnya dalam media komputer	Jumlah reformat data sensus/survei dari satu format ke format yang lainnya dalam media komputer	60 File
12	Terlaksananya Merancang dan membuat pedoman untuk pengolahan kegiatan statistik untuk Tabulasi	Jumlah pedoman untuk pengolahan kegiatan statistik untuk Tabulasi	2 Pedoman

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Terlaksananya membuat peta tematik digital kegiatan statistik	Jumlah peta tematik digital kegiatan statistik	12 Tema Tampilan
14	Terlaksananya memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan (Tingkat Kabupaten/Kota)	Jumlah tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan (Tingkat Kabupaten/Kota)	60 Tabel
15	Terlaksananya menyusun publikasi digital dari kegiatan statistik	Jumlah publikasi digital dari kegiatan statistik	10 Buku
16	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Statisti,



Ubai Dillah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

Statistisi Ahli Pertama



Dwi Saga Wanto, S.Mat
NIP. 19910223 201903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saparudin Herpin, S.AP

Jabatan : Pengelola Data Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ubai Dullah, SE

Jabatan : Fungsional Stastisi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

Pihak Pertama

Saparudin Herpin, S.AP
NIP. 19821215 201212 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
 Unit Kerja : Jabatan Fungsional Stastisi
 Nama Jabatan : Pengelola Data Statistik
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan Statistik	Jumlah bahan dan menyusun Rencana Kegiatan Statistik	3 Data
2	Terlaksananya menyiapkan bahan dan menyelenggarakan Survei Statistik Sektoral Lingkup Labupaten	Jumlah bahan dan menyelenggarakan Survei Statistik Sektoral Lingkup Labupaten	1 Data
3	Terlaksananya menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Data
4	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Stastisi,



Ubai Dullah, SE
NIP. 19750320 199802 1 002

Pengelola Data Statistik



Saparudin Herpin, S.AP
NIP. 19821215 201212 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anthony Irwan Rifani, SH

Jabatan : Fungsional Sandiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurdin, S.AP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Nurdin, S.AP, MM
NIP. 19650630 198603 1 010

Pihak Pertama

Anthony Irwan Rifani, SH
NIP. 19820121 200803 1 001


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Sandiman
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Penerapan Keamanan Informasi	80 %

- Kegiatan Anggaran :
1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 39,267,900

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,


Nurdin, S.AP, MM
NIP. 19650630 198603 1 010

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Sandiman


Anthony Irwan Rifani, SH
NIP. 19820121 200803 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Padeli, A.Md
Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Anthony Irwan Rifani, SH
Jabatan : Fungsional Sandiman

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,


Anthony Irwan Rifani, SH
NIP. 19820121 200803 1 001

Pihak Pertama


Padeli, A.Md
NIP. 19780103 201101 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Persandian dan Statistik
 Unit Kerja : Jabatan Fungsional Sandiman
 Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya membuat laporan operasi komputer	Jumlah laporan operasi komputer	215 Laporan
2	Terlaksananya membuat dokumen file yang tersimpan di dalam media komputer	Jumlah dokumen file yang tersimpan di dalam media komputer	50 Dokumen
3	Terlaksananya membuat Laporan hasil perekaman data	Jumlah Laporan hasil perekaman data	10 Laporan
4	Terlaksananya membuat program menengah	Jumlah program menengah	1 Program
5	Terlaksananya membuat petunjuk operasional program menengah	Jumlah membuat petunjuk operasional program menengah	1 Buku
6	Terlaksananya melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Jumlah melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	12 Sistem Operasi
7	Terlaksananya melakukan instalasi atau meningkatkan (upgrade) sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer	Jumlah instalasi atau meningkatkan (upgrade) sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer	9 Sistem Operasi
8	Terlaksananya mengikuti workshop/bimtek informasi teknologi	Jumlah workshop/bimtek informasi teknologi	2 Kegiatan
9	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Sandiman,


 Anthony Irwan Rifani, SH
 NIP. 19820121 200803 1 001

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan


 Padeli, A.Md
 NIP. 19780103 201101 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryanadi, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. Tamberin, S.SOS, MM

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Pihak Pertama

Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E Government	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang Memiliki Izin	100 %

Program Anggaran :
1 Program Aplikasi Informatika Rp. 619.855.400

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Dinas,



H.M. Tamberin, S.Sos, MM
NIP. 19630210 198603 1 028

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government



Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlinda, SE

Jabatan : Fungsional Pranata Komputer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aryanadi, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Aryanadi, S.Sos

NIP. 19730108 199303 1 003

Pihak Pertama

Herlinda, SE

NIP. 19831023 200901 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

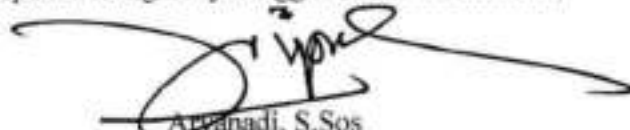
Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksanannya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI Gratis) bagi Masyarakat	3 Jaringan
2	Terlaksanananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di Data	75 Unit

Kegiatan	Anggaran :
1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 59,028,800

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,


 Alvanadi, S.Sos
 NIP. 19730108 199303 1 003

Jabatan Fungsional Pranata Komputer


 Herlinda, SE
 NIP. 19831023 200901 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudian Noor
Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herlinda, SE
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Herlinda, SE

NIP. 19831023 200901 2 006

Pihak Pertama

Rudian Noor

NIP. 19700806 200003 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

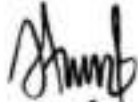
Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
 Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 Nama Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan E-Government	Jumlah bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan E-Government	1 Dokumen
2	Terlaksananya membantu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan E-Government	Jumlah data layanan E-Government	4 Berkas
3	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis layanan E-Government	Jumlah petunjuk teknis layanan E-Government	1 Dokumen
4	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah pusat serta pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah	Jumlah bahan dan melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah pusat serta pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah	44 Berkas
5	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan di bidang layanan E-Government	Jumlah bahan dan melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan di bidang layanan E-Government	4 Berkas
6	Terlaksananya membantu menyiapkan bahan dan menyusun laporan layanan E-Government	Jumlah bahan dan menyusun laporan layanan E-Government	1 Berkas

No	Sasaran Aktivitas	Indikator Aktivitas	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terlaksananya melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	1 Tahun

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Pranata Komputer,



Herlinda, SE

NIP. 19831023 200901 2 006

Pengelola Teknologi Informasi



Rudian Noor

NIP. 19700806 200003 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasran Noor, SH
Jabatan : Fungsional Manggala Informatika
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aryanadi, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

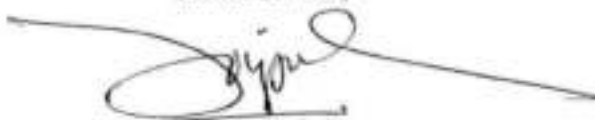
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

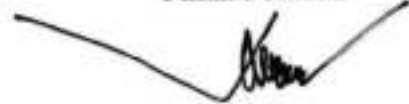
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,


Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

Pihak Pertama


Hasran Noor, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

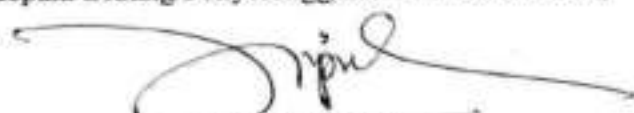
Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Manggala Informatika
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jangkauan Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun
2	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Waktu Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Bulan

- | | |
|--|-----------------|
| Kegiatan | Anggaran : |
| 1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 248,250,000 |

Rantau, 17 Januari 2022

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government,



Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

Jabatan Fungsional Manggala Informatika



Hasran Noor, SH
NIP. 19661120 199303 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwari Fauzi, S.Kom, M.Ikom
Jabatan : Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aryanadi, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government

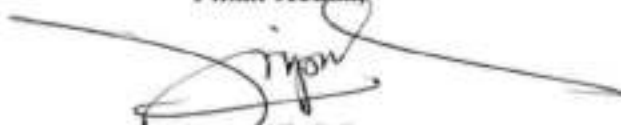
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,


Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

Pihak Pertama


Anwari Fauzi, S.Kom, M.Ikom
NIP. 19870109 201101 1 008

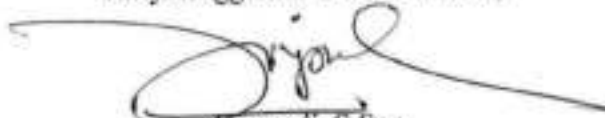
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E-Government
Unit Kerja : Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Talaksana dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sub Domain)	1 Sub Domain
2	Terlaksanananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Peserta Sosialisasi/Bimtek yang Memahami Pengelolaan Teknologi Informasi (Persen)	70 %
3	Terlaksananya Tatalaksana dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Domain)	1 Domain

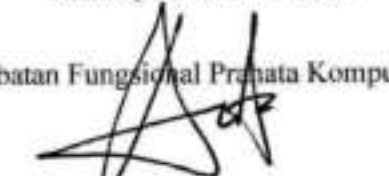
Kegiatan	Anggaran :
1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 103,576,600
2 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 209,000,000

Kepala Bidang
Penyelenggaraan E-Government,


Aryanadi, S.Sos
NIP. 19730108 199303 1 003

Rantau, 17 Januari 2022

Jabatan Fungsional Pranata Komputer


Anwar Fauzi, S.Kom, M.Ikom
NIP. 19870109 201101 1 008



**SOP PENGUKURAN KINERJA,
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA,
SOP MEKANISME EVALUASI SAKIP**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p> <p align="center">PENGUKURAN KINERJA</p>	Nomor SOP : 555/020.a/Diskominfo/2022
	Tgl Pengesahan : 18 Januari 2022
	Disahkan Oleh : Kepala Dinas
	 H.M. TAMBERIN, S.Sos, MM. Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196302101986031028
	Nama SOP : PENGUKURAN KINERJA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Inspektorat 4. Memahami Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA SKPD.
2	Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	

6	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	
7	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin	
8	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	
9	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP; 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Program kerja
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terlambat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SKPD : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar disposisi, paraf 3. Kasubag Perencanaan : Lembar disposisi, paraf Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENGUKURAN KINERJA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bappeda & Litbang	Sekretaris	Sek. Tim SAKIP	Anggota Tim SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Memertintahkan penyusunan pengukuran kinerja Bappedalitbang	Mulai				Lembar disposisi	15 menit	Disposisi Pimpinan			
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Form pengukuran kinerja	60 menit	Draft pengukuran kinerja			
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Form pengukuran kinerja	25 menit	Draft masukan dan arahan			
4	Mengundang kepala Bappedalitbang dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja					Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat			
5	Melakukan rapat pembahasan pengukuran kinerja					Draft pengukuran kinerja	120 menit	Draft pengukuran kinerja		SOP Pelaksanaan Rapat	
6	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat					Draft dokumen pengukuran kinerja	120 menit	Draft pengukuran kinerja			

7	Kabid menghimpun dan memvalidasi data kinerja						Draft dokumen pengukuran kinerja	240 menit	Draft pengukuran kinerja	
8	Menyampaikan data kinerja kepada Kasubbid Data						Draft dokumen pengukuran kinerja	40 menit	Draft pengukuran kinerja	
9	Kepala Badan mengoreksi dokumen pengukuran kinerja Bappeda dan Litbang						Dokumen pengukuran kinerja	60 menit	Dokumen pengukuran kinerja	
10	Sekretaris menyampaikan dokumen pengukuran kinerja kepada Kepala Badan untuk meminta persetujuan						Dokumen pengukuran kinerja	25 menit	Dokumen pengukuran kinerja	
11	Penandatangan dokumen pengukuran kinerja oleh Kepala Bappeda dan Litbang						Dokumen pengukuran kinerja	10 menit	Dokumen pengukuran kinerja	
12	Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat						Dokumen pengukuran kinerja	15 menit	Dokumen pengukuran kinerja	
13	Pengandaan dokumen pengukuran kinerja						Dokumen pengukuran kinerja	25 menit	Dokumen pengukuran kinerja	
14	Pengarsipan dokumen pengukuran kinerja						Dokumen pengukuran kinerja	10 menit	Dokumen pengukuran kinerja	

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KESALAHAN DATA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KASUBBAG PERENCANAAN DAN LAPORAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN LAPORAN**

PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KESALAHAN DATA

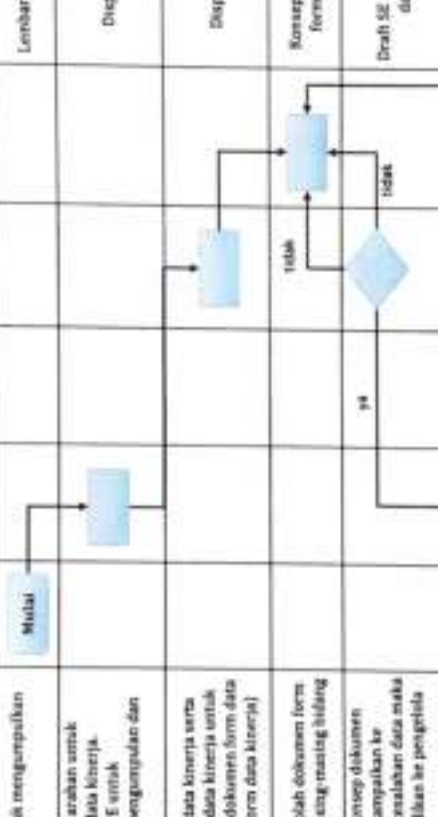
<p align="center"> </p>	Nomor SOP	SS5/029 a/Diskominfo/2022
	Tgl Pengesahan Disahkan Oleh	25 Januari 2022 Kepala Bidang
Nama SOP		<p align="center"> J.M. LAMBERIN, S.Sos, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196302101966031028 </p>



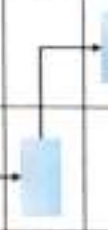



DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1. Mampu mengidentifikasi dan analisis terkait pelaksanaan kegiatan
2.	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	2. Memahami arahan dan kebijakan yang berlaku
3.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah	3. Menguasai penggunaan komputer dan jaringan
4.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Memiliki tingkat keahlian yang baik
		5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu

<p>5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</p>	
<p>6 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permenadagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permenadagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	
<p>7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</p>	
<p>8 Peraturan Menteri Pedyayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>	
<p>9 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin</p>	
<p>10 Peraturan Bupati (PESBUP) Kabupaten Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Keabubukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin</p>	
<p>11 Peraturan Bupati (PESBUP) Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</p>	
<p>12 Peraturan Bupati (PESBUP) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023</p>	
<p>13 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023</p>	
<p>SOP Pengelola Surat Masuk SOP Pengelola Surat Keluar</p>	<p>FEBALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan jaringan 2. Alat tulis kantor 3. Dokumen SAKIP 4. DPA/DPPA, Renja, RKPD, Renstra, RPJMD dan data lainnya
<p>Pengumpulan data kinerja akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya</p>	<p>PERINGATAN</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Database sub bagian perencanaan dan evaluasi (Sekretariat) berupa hardcopy dan softcopy</p>

PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KESALAHAN DATA

No	Urutan Prosedur	Prelaksana						Materi Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Pejabat Eselon III dan IV	Kasubag PE	Pengelola Data Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Memberikan perintah untuk pengumpulan data kinerja	Mulai									
2	Memberikan disposisi dan arahan untuk melakukan pengumpulan data kinerja. menormalkan Kasubag PE untuk mempersiapkan kegiatan pengumpulan dan form data kinerja										
3	Memberikan konsep form data kinerja serta memerintahkan pengelola data kinerja untuk mengisi dan melengkapi dokumen form data kinerja (urut edaran dan form data kinerja)										
4	Mempersiapkan dan mengisi dokumen form data kinerja untuk masing masing bidang										
5	Memeriksa dan memaraf konsep dokumen form data kinerja untuk disampaikan ke Sekretaris dan bila terjadi kesalahan data maka Sekretaris akan mengembalikan ke pengelola data kinerja										
6	Memeriksa dan memaraf konsep dokumen form data kinerja untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas										



7	Memeriksa dan memandatkan konsep dokumen form isian kinerja serta memformulasikan Sekrearis untuk mendistribusikan dokumen dimaksud				Draft SE dan form data	45 menit	Diposisi + Dokumen SE dan form data kinerja
8	Menerima perintah dan meneruskan dokumen dimaksud ke Kasubag PE				Diposisi + Dokumen SE dan form data kinerja	15 menit	Diposisi + Dokumen SE dan form data kinerja
9	Menerima dan mempelajari perintah serta menyampulkannya kepada pengelola data kinerja				Diposisi + Dokumen SE dan form data kinerja	30 menit	Dokumen SE dan form data kinerja
10	Memeriksa dan mendistribusikan form data kinerja ke bidang-bidang				Dokumen SE dan form data kinerja	15 menit	Dokumen SE dan form data kinerja + tanda terima
11	Menerima, mempelajari dan mengisi form data kinerja serta menyampulkannya dokumen dimaksud ke Kasubag PE				Dokumen SE dan form data kinerja	1 jam	
12	Menerima dan memverifikasi form data kinerja dari bidang serta menyampulakan dokumen dimaksud ke pengelola data kinerja				Dokumen form data kinerja yang telah diisi dan dilengkapi dengan data pendukung	1 jam	
13	Menginventarisasi data kinerja dari bidang-bidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan				Dokumen form data kinerja data pendukung yang telah diverifikasi	2 jam	

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KASUBBAG PERENCANAAN DAN LAPORAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN LAPORAN**

**MEKANISME EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)**

Nomor SOP	: 555/022.a/Diskominfo/2022
Tgl Pengesahan	: 20 Januari 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas 
Nama SOP	: H.M. TAMBERIN, S.Sos, MM. Pembina Utama Muda, IV/c NIP.196302101986031028 MEKANISME EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

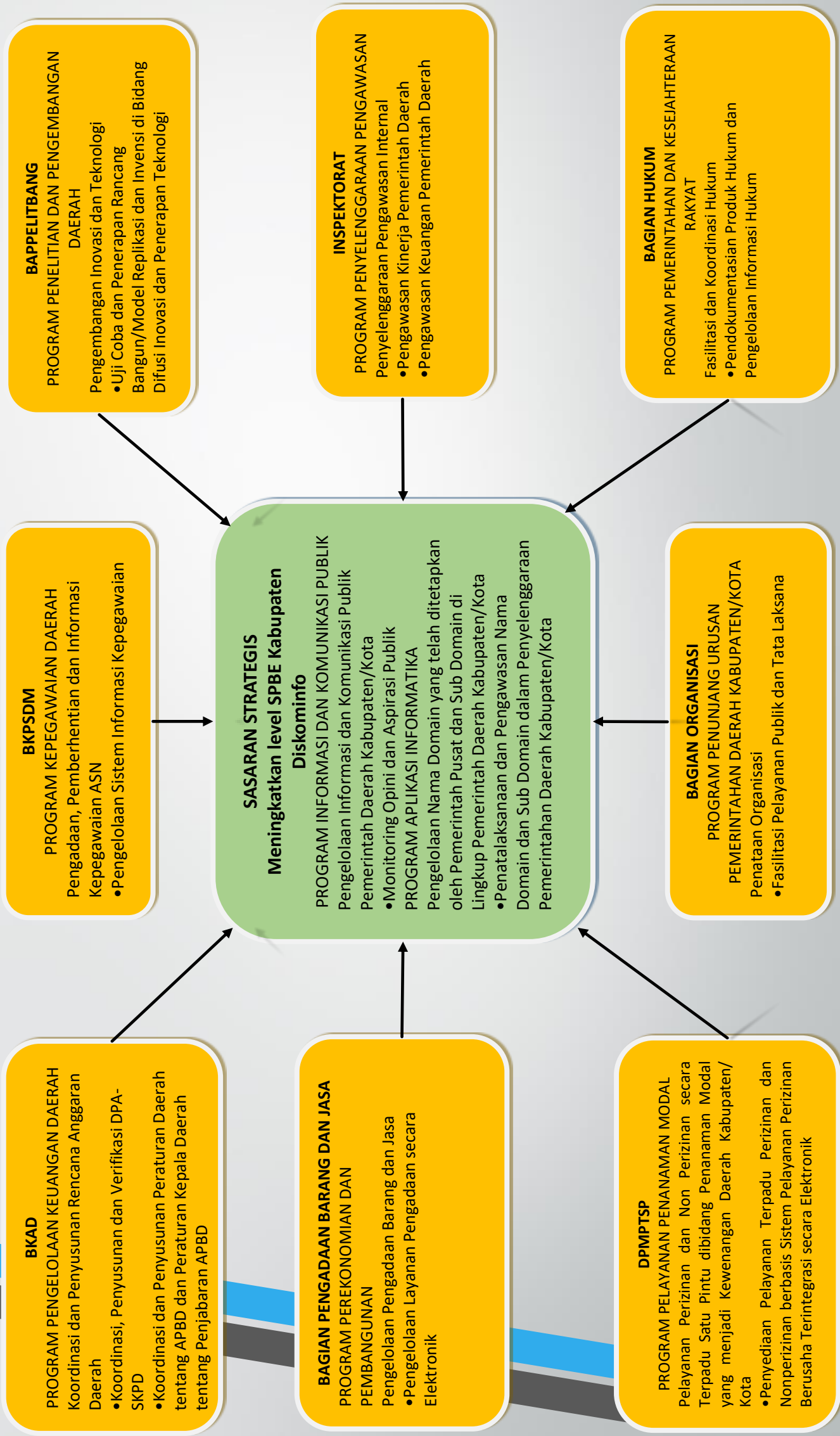
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memahami tentang ketentuan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2. Memiliki pemahaman tentang evaluasi SAKIP 3. Memiliki kemampuan dalam mengevaluasi SAKIP
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
4	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	

5	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin	
6	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin	
7	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	
8	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkapan 2. Alat tulis kantor 3. Dokumen SAKIP
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terdapat pedoman baku dalam melakukan pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja akan terhambat		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

7	Menyusun laporan hasil evaluasi									Hasil Evaluasi SAKIP Internal	3 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal
8	Menerima dan mengarsipkan laporan hasil evaluasi SAKIP Internal untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas									Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal
9	Menerima laporan hasil evaluasi SAKIP internal dan memerintahkan sekretaris untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal									Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal
10	Sekretaris menerima laporan hasil Evaluasi SAKIP Internal dan memerintahkan penyusun program anggaran dan pelaporan untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal									Laporan Evaluasi SAKIP Internal	1 hari	Laporan Evaluasi SAKIP Internal
11	Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal									Laporan Evaluasi SAKIP Internal	5 hari	Draft rencana tindak lanjut
12	Menerima, meneliti dan mengoreksi draft rencana tindak lanjut perbaikan dokumen, jika disetujui disampaikan kepada Sekretaris									Draft rencana tindak lanjut	1 hari	Draft rencana tindak lanjut
13	Menerima, meneliti dan mengoreksi dan mengesahkan dokumen rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP									Draft rencana tindak lanjut	1 hari	Dokumen SAKIP

CROSSCUTTING

Crosscutting



MONEY RENSTRA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. 01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114

RANTAU



Email : kominfo@tapinkab

Nomor : 000/057/Diskominfo/2023

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.
Karyawan/Karyawati
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapin
di-
Tempat

Sehubungan dengan sudah berakhirnya Triwulan IV (Empat) dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Renstra Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, maka kami harapkan kehadiran seluruh Karyawan/i untuk dapat mengikuti rapat yang dimaksud pada :

Hari/Tgl : Selasa, 07 Februari 2023
Waktu : 09:00 Wita - Selesai
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapin
Acara : Rapat Monev Renstra Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2021

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Rantau, 03 Februari 2023



HM. Tamberin, S.Sos,MM
NIP. 19630210 198603 1 028

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	Selasa, 07 Februari 2023
Jam	09.00 wita - Selesai
Tempat	Diskominfo Kab. Tapin
Perihal	Rapat Money Renstra Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Diskominfo, Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf yang memberikan hasil antara lain :

1. Pada Tahun 2021 dari hasil terakhir melalui asisiten SAKIP oleh asesor Kemenpan – RB Bapak Ananda Juarsa terdapat penambahan IKU dari 4 IKU pada Sasaran menjadi 7 IKU dengan 7 sasaran yaitu
 1. Memastikan Seluruh Tapin bebas Blank Spot di tahun 2023
 2. Memastikan Area Publik Tapin Well Connected
 3. Meningkatnya Level SPBE Kabupaten
 4. Memastikan Seluruh Advan Masyarakat ditindak lanjuti
 5. Meningkatnya layanan terhadap informasi publik
 6. Meningkatnya layanan Statistik Sektoral
 7. Meningkatnya layanan Pengamanan data dan persandian
2. Pada sasaran pertama, kedua, dan ketiga yang diampu oleh Bidang Penyelenggaraan Egovernment yaitu
 1. Capaian Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot sampai dengan Triwulan tahun 2022 adalah 95,23% terealisasi dengan baik dari target 97%, artinya dari 126 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin sudah 120 Desa yang terkoneksi jaringan komunikasi/internet nya.
 2. Capaian Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs dengan capaian 73,37% dari target 90% sudah cukup baik, namun bisa dipastikan beberapa Area Publik khususnya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.
 3. Capaian SPBE Kabupaten Tapin dari target renstra pada nilai 3 sampai dengan tahun 2022 terealisasi dengan cukup baik berada pada nilai 2,29, namun penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator SPBE Kemenpan untuk tahun 2021 terjadi peningkatan berada pada nilai 1,89.
3. Pada sasaran keempat dan kelima yang diampu oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitu
 1. Capaian dari Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti ditahun 2022 sebesar 100% dan secara keseluruhan hasil ini sudah

- cukup baik dimana setiap aduan masyarakat melalui layanan Aplikasi LAPOR selalu ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.
2. Capaian dari Persentase Informasi Publik Yang Terlindungi Dari Penyalahgunaan Pemberitaan, dari target renstra 100% sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sudah mencapai target yang diharapkan.
 4. Pada sasaran keenam dan ketujuh yang diampu oleh Bidang Persandian dan Statistik yaitu
 1. Capaian dari persentase data statistik yang disediakan pada Triwulan IV tahun 2022 dengan capaian 100% terealisasi dengan baik, dibandingkan dengan target renstra dengan capaian sama 90%, artinya capaian ini sudah sesuai harapan.
 2. Capaian dari persentase layanan pengamanan data dan persandian pada Triwulan tahun 2022 dengan capaian 100%, dibandingkan dengan target renstra 90% hasil ini sudah sesuai harapan.
 5. Secara keseluruhan capaian Renstra sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dilaksanakan dengan sangat baik dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan
 6. Diskusi permasalahan dan kendala dalam setiap kegiatan bidang termasuk juga keterlambatan dalam penyampain data.
 7. Komitmen bersama seluruh ASN Diskominfo untuk dapat mempertahankan hasil yang sudah baik dan meningkatkan kinerja seluruh pegawai untuk tahun berikutnya.

Pembuat Notulen,



Agus Setiawan Marwan, SE
NIP. 19760817 201101 1 006

RECHENUNGSABRECHNUNG ZUM 31.12.2022

RECHENUNGSABRECHNUNG ZUM 31.12.2022



Konto	Anzahl	Betrag	Anzahl	Rechnerische Mittel												Anzahl	Betrag
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. BILANZ		31.12.2021	31.12.2022	I. BILANZ													31.12.2022
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				II. GUVERNANZ													
				III. VERMÖGENSSEITIG													
				IV. VERPFLICHTUNGSSEITIG													
				V. VERBUNDENRECHNUNG													
				VI. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				VII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				VIII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				IX. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				X. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XI. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XIII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XIV. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XV. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XVI. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XVII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XVIII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XIX. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XX. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXI. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXIII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXIV. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXV. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXVI. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXVII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXVIII. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXIX. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													
				XXX. SONSTIGE VERBUNDENRECHNUNGEN													

RECHNUNGSABRECHNUNG ZUM 31.12.2022

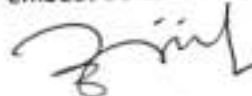


**DAFTAR HADIR RAPAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Februari 2023
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Diskominfo

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Hti. Tambu	Kadiv	1. 
2.	Hari N Farid	Sekretari	2. 
3.	M. Ikhsan	Pratis Perencanaan	3. 
4.	Rika Krisnawati	Umpep	4. 
5.	Norbaitina	Kabid. Statistik	5. 
6.	Agus Setiawan M.	Kasubag Perenc & Pelap.	6. 
7.	Dewi Yunita. br	Kasubag Icu	7. 
8.	HERLINDA	JFT. PRATOM	8. 
9.	Muhammad Hakimatullah	Pranata Jaringan Iptek	9. 
10.	Umi Kalsum	PTT	10. 
11.	MUHAMMAD REZKI ALFIAN	PTT	11. 
12.	LAKMUEL AKHMED	PTT	12. 
13.	ANTHONY IRWAN R	JFT SANDIMAN	13. 
14.	Fathul Samah	Penata Keunggulan	14. 
15.	ROOSITA YUNITA	PTT	15. 

Pembuat Daftar Hadir,



Agus Setiawan Marwan, SE
19760817 201101 1 006

RENCANA AKSI

DOKUMEN RENAKSI
Dinas Komunikasi dan Informatika
2022-MURNI

#	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PER TRIWULAN				REALISASI 2022	REALISASI PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV
SASARAN STRATEGIS 1 : MEMASTIKAN SELURUH TAPIN BEBAS BLANKSPOT DI TAHUN 2023												
1	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	Persentase	97	95	96	96	97	95.23	95.23	95.23	95.23	96.82
SASARAN STRATEGIS 2 : MEMASTIKAN AREA PUBLIK TAPIN WELL CONNECTED												
1	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS	Persentase	90	70	75	80	90	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATKAN LEVEL SPBE KABUPATEN												
1	Level SPBE Kabupaten Tapin	Point	3	2	2.5	2.5	3	2.29	1.89	1.89	2.29	2.29
SASARAN STRATEGIS 4 : MEMASTIKAN SELURUH ADUAN MASYARAKAT DITINDAKLANJUTI												
1	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	Persentase	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100
SASARAN STRATEGIS 5 : MENINGKATKAN LAYANAN TERHADAP INFORMASI PUBLIK												
1	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	Persentase	100	25	50	75	100	100	25	50	75	100
SASARAN STRATEGIS 6 : MENINGKATKAN LAYANAN STATISTIK SEKTORAL												
1	Persentase Data Statistik yang disediakan	Persentase	90	0	25	50	90	90	0	25	50	90
SASARAN STRATEGIS 7 : MENINGKATKAN LAYANAN PENGAMANAN DATA DAN PERSANDIAN												
1	Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian	Persentase	90	25	50	75	90	90	25	50	75	90

MONEV RENCANA AKSI



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru Rt. 01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
RANTAU



Email : kominfo@tapinkab

Nomor : 000/036 /Diskominfo/2023

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.
Karyawan/Karyawati
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapin
di-
Tempat

Sehubungan dengan sudah berakhirnya Triwulan IV (Empat) dengan ini akan dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu, maka kami harapkan kehadiran seluruh karyawan/i untuk dapat mengikuti rapat yang dimaksud pada :

Hari/Tgl : Senin, 06 Februari 2023
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapin
Acara : Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev Indikator Kinerja Individu
Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2022

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Rantau, 03 Februari 2023



HM. Tamberin, S.Sos,MM
NIP. 19630210 198603 1 028

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	: Senin, 06 Februari 2023
Jam	: 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat	: Diskominfo Kab. Tapin
Perihal	: Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Diskominfo, Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf yang memberikan hasil antara lain :

1. Disampaikan capaian realisasi Rencana Aksi kegiatan masing-masing Bidang Dinas Kominfo,
2. Membahas mengenai Indikator Kinerja Individu Staf, baik yang berada di Sekretariat maupun di Bidang
3. Pada Bidang Penyelenggaraan E-Government, untuk Program Aplikasi Informatika dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.885.291.317 atau 96,09% yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.605.906.895 atau 96,89%, melalui Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.204.567.426 atau 95,15%, dan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 401.339.469 atau 97,80%.
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.279.384.422 atau 94,38%, melalui Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.207.940.000 atau 98,81%, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.24.965.922 atau 79,11%, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan Rp.28.006.000 atau 78,96%. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 18.412.500 atau 99,80%.

4. Pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, untuk Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.671.006.900 atau 100% yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian Kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.671.006.900 atau 99,99%, melalui Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 48.200.000 atau 100%, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 12.600.000 atau 100%, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan capaian 100% dan realisasi keuangan Rp. 32.860.000 atau 99,70%, dan Layanan Hubungan Media dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.547.896.900 atau 100%.
5. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 62.127.900 atau 100% yang didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp. 62.127.900 atau 100%, melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan output 210 buah buku KDA, PDRB dan Ekonomi Makro yang dicetak.
6. Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja 100% yang didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp.36.103.900 atau 91,94% melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bebas Elektronik dan Non Elektronik.
7. Terkait dengan Kinerja Individu untuk jabatan Pelaksana/Staf dilingkungan Dinas Kominfo yaitu sebagai berikut:
 - Staf Perencanaan dan Pelaporan An. Muhammad Ikhsan, SE dan Hikmatullah, A.md dengan salah satu tupoksinya yaitu membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Renstra, Renja, PK dan IKU Dinas yang terintegrasi
 - Staf Keuangan (Bendahara Pengeluaran) An. Fathul Jannah, SST dengan salah satu tupoksinya yaitu membantu menyiapkan bahan dan membantu mengelola Penatausahaan Keuangan, Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - Staf Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi An. Padeli, A.Md dengan salah satu tupoksinya yaitu membuat dokumen file yang tersimpan di dalam media komputer.
 - Staf Persandian An. Padeli, A.Md dengan salah satu tupoksinya yaitu mengetik dan menyiapkan bahan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Bidang Persandian.

- Staf Statistik An. Dwi Siaga Wanto, S.Mat dan Taufiqurrahman, S.Kom dengan salah satu tupoksinya yaitu mengumpulkan bahan/informasi pendukung untuk kegiatan Statistik.
 - Staf Statistik An. Saparudin Herpin, S.AP dengan salah satu tupoksinya yaitu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Statistik.
 - Staf Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik An. Diky Purnomo, S.Kom dengan salah satu tupoksi nya yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan komunikasi publik.
 - Staf Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media An. Warniati dengan salah satu tupoksinya yaitu membantu menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan informasi publik dan hubungan media.
8. Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Individu Triwulan IV Tahun 2022 untuk Staf yaitu dapat dilaksanakan dengan sangat baik dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan
 9. Diskusi permasalahan dan kendala dalam setiap kegiatan bidang termasuk juga keterlambatan dalam penyampain data.
 10. Terkait monev Rencana Aksi, untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di triwulan ke IV diharapkan semua bidang agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target nya.

Pembuat Notulen,



Muhammad Ikhsan, SE
NIP. 19881122 201903 1 002

Capaian Kinerja Utama/Sasaran tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot	97%	95,23%	98,18%
Memastikan Area Publik Tapin Well Connect	Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan Internet Rata-rata 50 MBPs	90%	66,03%	73,37%
Meningkatnya level SPBE Kabupaten	Level SPBE Kabupaten Tapin	3	2,29	76,33
Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti	100	100	100
Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat	100	100	100
Meningkatnya layanan statistik sektoral	Persentase data statistik yang disediakan	90	90	100
Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian	Persentase layanan pengamanan data dan persandian	90	90	100

N/B :


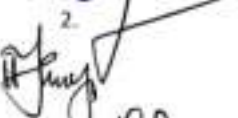

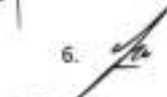



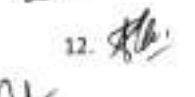

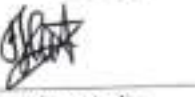

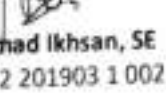



Dikumpulkan paling lambat tanggal 6 januari 2023

**DAFTAR HADIR RAPAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

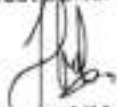
Hari /Tanggal : Senin, 06 Februari 2023

Waktu : 09.00 s/d selesai

Tempat : Diskominfo

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	HA. Tambi	Wakil	1. 
2.	Haris Faridi	Stasiun	2. 
3.	Dewi Yuniha D	Dasbag Icu	3. 
4.	Notarisna	Kabid. Statistik	4. 
5.	Rita Krisnawati	Umpan	5. 
6.	ANTHONY IRWAN R	JFT SANDIMAN	6. 
7.	Agus Setiawan M	Kabang Perencanaan & Pelap	7. 
8.	HERLINDA	JFT. PRAKOM	8. 
9.	M. Ikhsan	Prati Perencanaan	9. 
10.	Muhammad Alhamatullah	Pranata Jaringan Iptek	10. 
11.	Fathu Tannah	Penata Keuangan	11. 
12.	MUHAMMAD REZKI ALFIAN	PTT	12. 
13.	LAUWHEL AKHMED	PTT	13. 
14.	ROOSITA YUNITA	PTT.	14. 
15.	Umi Kalsum	PTT	15. 

Pembuat Daftar Hadir,


Muhammad Ikhsan, SE
19881122 201903 1 002

Rapat Monev Rencana Aksi dan Monev Indikator Kinerja Individu Triwulan IV (Empat) TA 2022



Dokumen MONEV RENAKSI 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika
2022-MURNI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV					
1. Memastikan Seluruh Tapin Bebas Blankspot di Tahun 2023	1. Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot					2.16.03-PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	Rp.43.895.400,00						1. H. Muhammad Tamberin, , S.Sos, MM			
		25%	50%	75%	100%				18,75%	50%	73%	100%					
									2.16.03.2.02-Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.43.895.400,00						1. Aryanadi, , S.Sos
		25%	50%	75%	100%							12,50%	50%		70%	100%	
						2.16.03.2.02.10-Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan	Rp. 43.895.400,00					1. ANWARI FAUZI,, S.Kom M.IKom 2. HERLINDA, SE 3. Rudian Noor,				
0 Paket	1 Paket	0 Paket	2 Paket	0 Paket	1 Paket				1 Paket	2 Paket							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB		
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV			
2	Memastikan Area Publik Tapin Well Connected	1. Persentase Area Publik Kabupaten Tapin Dengan Kecepatan Internet rata-rata 50 MBPS					Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
						2.16.03-PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Rp.304.360.000,00						1. H. Muhammad Tamberin, , S.Sos, MM	
		25%	50%	75%	100%		Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin		18,75%	50%	73%	100%		1. Aryanadi, , S.Sos	
		2.16.03.2.02-Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.268.000.000,00						
		25%	50%	75%	100%	2.16.03.2.02.04- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				25%	50%	75%	100%	1. Hasran Noor, SE, SH	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
													S.Sos	
					<i>Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25%	50%	75%	100%		
					2.16.03.2.02.01- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 209.000.000,00							1. ANWARI FAUZI,, S.Kom M.IKom
						Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18,8%	37,5%	55%	75%		
					2.16.03.2.02-Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.118.600.000,00							1. Aryanadi , , S.Sos
						Terlaksananya Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			12,50%	50%	70%	100%		
					2.16.03.2.02.01- Penatalaksanaan dan		Rp. 110.350.000,00							1. ANWARI FAUZI,,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							S.Kom M.IKom
		18,75%	37,5%	56%	75%	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18,8%	37,5%	55%	75%	
						2.16.03.2.02.12-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp. 8.250.000,00					1. Hasran Noor, SE, SH
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			0 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	
4	Memastikan Seluruh Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti	1. Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak Lanjuti											
						2.16.02-PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp.48.200.000,00					1. H. Muhammad Tamberin, , S.Sos, MM
		25%	50%	75%	100%	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI			20%	40%	82%	100%	
						2.16.02.2.01-Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.48.200.000,00					1. UMAR FAISAL, S.SOS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		25%	50%	75%	100%	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota			20%	40%	82%	100%		
						2.16.02.2.01.02-Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp. 48.200.000,00					1. DIKY PURNOMO, S.Kom 2. Rika Krisnawati, ST	
		15 Orang	30 Orang	45 Orang	60 Orang	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			15 Orang	30 Orang	51 Orang	60 Orang		
5	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik	1. Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap Masyarakat												
						1-PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Rp.1.171.440.800,00						1. H. Muhammad Tamberin, S.Sos, MM
		25%	50%	75%	100%	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI			20%	40%	82%	100%		
						2.16.02.2.01-Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.1.171.440.800,00						1. UMAR FAISAL, S.SOS
		25%	50%	75%	100%	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota			20%	40%	82%	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
													1. RISKA HERNILDA, SP	
					2.16.02.2.01.05-Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Rp. 12.600.000,00						
		120 Berita	240 Berita	360 Berita	480 Berita	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik				120 Berita	240 Berita	360 Berita	480 Berita	
								Rp. 29.450.000,00						1. RISKA HERNILDA, SP
					2.16.02.2.01.06-Pelayanan Informasi Publik					3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	
						Waktu Pelayanan Informasi Publik								1. M. Karno Rayadi, S.Sos
					2.16.02.2.01.07-Layanan Hubungan Media			Rp. 1.096.432.000,00						
						Terlaksananya Layanan Hubungan Media				2500 Menit	5000 Menit	7500 Menit	10000 Menit	
					2.16.02.2.01.12- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitraan Komunitas			Rp. 32.958.800,00						1. RISKA HERNILDA, SP
						Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitraan Komunitas				0 Orang	0 Orang	60 Orang	60 Orang	
	Meningkatnya Layanan Statistik Sektoral													
6	1. Persentase Data Statistik yang disediakan													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB			
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV				
					2.20.02-PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Rp.67.117.900,00								1. H. Muhammad Tamberin, , S.Sos, MM
		25%	50%	75%	2.20.02.2.01- <i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disajikan		20%	40%	65%	100%					1. Nurdin, , S.AP, MM
						Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, Ekonomi Makro Yang dicetak			0 Buah	50 Buah	100 Buah	210 Buah				
					2.20.02.2.01-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Rp. 67.117.900,00								1. Dwi Siaga Wanto, S.Mat 2. UBAI 3. Saparudin Herpin, , S.AP
						Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		0 Buah	50 Buah	100 Buah	210 Buah					
	Meningkatnya Layanan Pengamanan Data dan Persandian	1. Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB		
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV			
						2.21.02-PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Rp.39.267.900,00							1. H. Muhammad Tambertin, , S.Sos, MM
		20%	40%	60%	80%		Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian		20%	40%	60%	80%			
						2.21.02.2.01- Penyelenggaraan Persandian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.39.267.900,00							1. Nurdin, , S.AP, MM
		20%	40%	60%	80%		Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		20%	40%	60%	80%			
						2.21.02.2.03-Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp. 39.267.900,00							1. Padeli, A.Md 2. Anthony Irwan Rifani, SH
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		Waktu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB		
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV			
Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat														
						X.XX.01-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.5.051.706.600,00							1. H. Muhammad Tamberin, S.Sos, MM
		25%	50%	75%	100%		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor		20%	51,11%	69,03%	100%			
						X.XX.01.2.08-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.12.600.000,00							
		2 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu		20%	4 Dokumen	4 Dokumen	10 Dokumen			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
													1. Agus Setiawan Marwan, , SE 2. Muhammad Ikhsan, SE	
					X.XX.01.2.08.-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 12.600.000,00							
			25%	50%	75%	100%			20%	40%	40%	100%		
							Rp.3.431.176.420,00							1. Ir. Hj. Gusti Kamariah, , M,MA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan		
					X.XX.01.2.08.-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp. 3.427.576.420,00							1. Fathul Jannah, SST 2. Dewi Yunita Darma Santi, S.PI
						Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		
					X.XX.01.2.08.-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp. 2.050.000,00							1. Fathul Jannah, SST 2. Dewi Yunita Darma Santi,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
													S.PI
		0%	0%	0%	100%	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			0%	0%	0%	100%	
						X.XX.01.2.08.-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp. 1.550.000,00					1. Fathul Jannah, SST 2. Dewi Yunita Darma Santi, S.PI
		0%	0%	50%	100%	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran			0%	0%	50%	100%	
						X.XX.01.2.08-Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp.803.582.000,00					1. Ir. Hj. Gusti Kamariah, , M.MA
		36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN			36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	
						X.XX.01.2.08.-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 45.661.100,00					1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	
						X.XX.01.2.08.-Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp. 76.401.900,00					1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	Tersedianya Bahan Logistik dan Kebersihan kantor			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
													1. Noor Hasanah, , S.Sos	
			X.XX.01.2.08.-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp. 50.000.000,00						
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		
			X.XX.01.2.08.-Fasilitasi Kunjungan Tamu					Rp. 8.000.000,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan		
			X.XX.01.2.08.-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 623.519.000,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		
			X.XX.01.2.08.-Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp.456.512.680,00						1. Ir. Hj. Gusti Kamariah, , M,MA
		2 Paket	4 Paket	6 Paket	7 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4 Paket	5 Paket	7 Paket		
			X.XX.01.2.08.-Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 456.512.680,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		25%	50%	75%	100%	Tersedianya Peralatan dan			16,67%	66,67%	83,33%	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB					
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV						
						Mesin Lainnya											1. Ir. Hj. Gusti Kamariah, , M,MA	
						X.XX.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.281.331.000,00										
			25%	50%	75%	100%	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25%	50%	75%	100%					
						X.XX.01.2.08.-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 124.331.000,00										1. Noor Hasanah, , S.Sos
			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan					
						X.XX.01.2.08.-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp. 157.000.000,00										1. Noor Hasanah, , S.Sos
			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Umum Kantor			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan					
						X.XX.01.2.08-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.66.504.500,00										1. Ir. Hj. Gusti Kamariah, , M,MA
			25%	50%	75%	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25%	50%	75%	100%					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
						X.XX.01.2.08.-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp. 34.834.500,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		
						X.XX.01.2.08.-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 12.955.000,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		
						X.XX.01.2.08.- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp. 18.715.000,00						1. Noor Hasanah, , S.Sos
		3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 bulan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan		

MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Atas Nama
Tahun Anggaran

: Dinas Komunikasi dan Informatika
: Bidang Persandian dan Statistik
: Anthony Inwan Rifani, SH
: 2022

No.	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I (6)	TW II (7)	TW III (8)	TW IV (9)
1.	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	20%	40%	60%	80%

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,



Norbaitina S. Sos
Penata Tk III/c

NIP. 19860411 201402 2 002

JFT Sandiman,



Anthony Inwan Rifani, SH
Penata Tk VIII/d

NIP. 19750320 199802 1 002

Rantau, Desember 2022

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Atas Nama
Tahun Anggaran

: Dinas Komunikasi dan Informatika
: Bidang Persandian dan Statistik
: Ubai Dullah, SE
: 2022

No.	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I (6)	TW II (7)	TW III (8)	TW IV (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, dan Ekonomi Makro yang Dicitak	210 buah	0 buah	50 buah	100 buah	210 buah

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang Persandian dan Statistik,



Norbaitina, S.Sos
Penata /III/c

NIP. 19860411 201402 2 002

JFT Stastisi,



Ubai Dullah, SE
Penata /III/c

NIP. 19750320 199802 1 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi
Unit Kerja
Atas Nama
Tahun Anggaran

: Dinas Komunikasi dan Informatika
: Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
: Riska Hemilda, SP
: 2022

No.	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
					TW I (6)	TW II (7)	TW III (8)	TW IV (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Teraksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten (Berita)	480 Berita	120 Berita	240 Berita	360 Berita	480 Berita
	Teraksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Mitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi Pelajar (Siswa)	60 Orang	0 Orang	0 Orang	60 Orang	60 Orang
			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	2 KIM	1 KIM	1 KIM	2 KIM	2 KIM

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, JFT. Pranata Hubungan Masyarakat.



Umar Faisal, S.Sos
Penata Tk I (III/d)

NIP. 19680618 198803 1 006



Riska Hemilda, SP
Penata Tk I (III/d)

NIP. 19800517 200604 2 015

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
Atas Nama : Warniati
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
Penata Tk I (III/d)
NIP. 196806181988031006

Pengelola TV dan Radio,



Warniati
Penata Muda (III/a)
NIP. 19701014 200604 2 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Penyelenggaraan E- Government
Unit Kerja : Seksi Layanan E-Government
Atas Nama : Muhammad Hikmatullah, A.Md
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membantu terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota dan kota cerdas	100%	25%	50%	75%	100%
2.	Membantu meningkatkan persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin (%)	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-
government,



Hasran Noor, SH
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19661120 199303 1 004

Pranata Jaringan Iptek,



Muhammad Hikmatullah, A.Md
Pengatur (II/c)

NIP. 199109072022021002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
Atas Nama : Muhammad Karno Rayadi, S.Sos
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menyiapkan Bahan Dan Melaksanakan Layanan Pengolahan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Melalui Kemitraan Media	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,



Umar Faisal, S.Sos
Penata Tk I (III/d)
NIP. 196806181988031006

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media,



M. Karno Rayadi, S.Sos
Penata Muda Tk I (III/b)
NIP. 19850615 201001 1 019

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Unit Kerja : Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
Atas Nama : Diky Purnomo, S.Kom
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah masyarakat yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik (orang)	100%	25%	50%	75%	100%
2.	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang diteruskan ke SKPD terkait (laporan)	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Umar Faisal, S.Sos

Penata Tk I (III/d)

NIP. 196806181988031006



Diky Purnomo, S.Kom

Penata Muda (III/a)

NIP. 198611022022021001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subag Perencanaan dan Pelaporan
 Atas Nama : Muhammad Ikhsan, SE
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya draf usulan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang terintegrasi.	100%	60%	40%	-	-
2.	Terselenggaranya penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan RKPA (Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran) secara optimal	100%	-	50%	100%	-
3.	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) yang akurat	100%	25%	50%	75%	100%
4.	Tersedianya draf penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Perangkat Daerah yang lengkap	100%	100%	-	-	-

Rantau, Desember 2022

Kasubag Perencanaan
dan Pelaporan,



Agus Setiawan Marwan, SE
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 19760817 201101 1 006

Analisis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan



Muhammad Ikhsan, SE
 Penata Muda (III/a)
 NIP. 19881122 201903 1 002

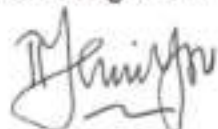
**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subag Keuangan
 Atas Nama : Fathul Jannah, SST
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan	100%	100%	-	-	-
2.	Jumlah bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan	100%	100%	-	-	-
3.	Jumlah bahan pengesahan dokumen anggaran	100%	100%	-	-	-
4.	Jumlah bahan dan membantu mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi	100%	100%	-	-	-
5.	Jumlah bahan dan membantu memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	25%	50%	75%	100%
6.	Jumlah bahan dan menyusun laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan	100%	25%	50%	75%	100%
7.	Waktu melaksanakan tugas lain dari atasan langsung sesuai bidang tugas dan kewenangannya	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kasubbag Keuangan,



Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19760605 200701 2 040

Penata Keuangan,



Fathul Jannah, SST
 Penata Muda (III/a)
 NIP. 19960603 201903 2 003

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Statistik dan Persandian
 Unit Kerja : Seksi Statistik
 Atas Nama : Taufiqurrahman, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membantu menyediakan data untuk Pembuatan dan Pencetakan Buku Statistik Sektoral	100%	25%	50%	75%	100%
2.	Membantu menyediakan data untuk Pembuatan dan Pencetakan Buku KDA Tahun 2022	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kabid Statistik dan Persandian,



Norbaitina, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 19860411 201402 2 002

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Taufiqurrahman, S.Kom

Penata Muda (III/a)

NIP. 19890604 202202 1 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Statistik dan Persandian
Unit Kerja : Seksi Statistik
Atas Nama : Saparudin Herpin, S.AP
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mengumpulkan bahan informasi pendukung untuk mengelola kegiatan Statistik Sektoral	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kabid Statistik dan Persandian,



Norbaitina, S.Sos

Penata (III/c)

NIP. 19860411 201402 2 002

Pengelola Data Statistik,



Saparudin Herpin, S.AP

Penata Muda (III/a)

NIP. 19821215 201212 1 001


**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Statistik dan Persandian
 Unit Kerja : Seksi Persandian
 Atas Nama : Padeli, A.Md
 Tahun Anggaran : 2022


No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi	100%	25%	50%	75%	100%
2.	Melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi	100%	25%	50%	75%	100%
3.	Melakukan implementasi teknologi data	100%	25%	50%	75%	100%
4.	Melakukan pengumpulan informasi dasar untuk kebutuhan audit TI	100%	25%	50%	75%	100%
5.	Melakukan instalasi/upgrade sistem operasi komputer/perangkat lunak pada infrastruktur TI	100%	25%	50%	75%	100%
6.	Menyusun petunjuk operasional program aplikasi	100%	25%	50%	75%	100%
7.	Membuat program aplikasi	100%	25%	50%	75%	100%
8.	Membuat desain grafis	100%	25%	50%	75%	100%
9.	Mengikuti Pelatihan Fungsional	100%	-	100%	100%	100%
10.	Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.	100%	25%	50%	75%	100%

Rantau, Desember 2022

Kabid Statistik dan Persandian,


Norbaltina, S.Sos
 Penata (III/c)
 NIP. 19860411 201402 2 002

Prakom Pelaksana Lanjutan,


Padeli, A.Md
 Penata Muda Tk I (III/b)
 NIP. 19780103 201101 1 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Unit Organisasi : Bidang Statistik dan Persandian
Unit Kerja : Seksi Statistik
Atas Nama : Dwi Siaga Wanto, S.Mat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membuat Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Tapin - 2022 (Kompilasi Produk Administrasi)	100%	25%	50%	75%	100%

Kabid Statistik dan Persandian,



Norbaitina, S. Sos
Penata (III/c)

NIP. 19860411 201402 2 002

Rantau, Desember 2022

Statistisi Ahli Pertama,



Dwi Siaga Wanto, S. Mat
Penata Muda (III/a)

NIP. 19910223 201903 1 002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

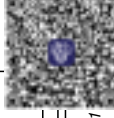


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA
SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.001 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.001.000 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	130.000.000,00	145.827.000,00	112,17	134.043.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.000.000,00	145.827.000,00	112,17	134.043.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	130.000.000,00	145.827.000,00	112,17	134.043.000,00
5	BELANJA DAERAH	7.852.291.836,00	7.459.914.003,00	95,00	5.344.527.352,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.195.129.956,00	6.810.272.503,00	94,65	5.064.185.552,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.432.001.856,00	3.104.248.126,00	90,45	2.891.446.510,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.306.631.200,00	3.249.527.477,00	98,27	2.172.739.042,00
5.1.05	Belanja Hibah	456.496.900,00	456.496.900,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	657.161.880,00	649.641.500,00	98,86	280.341.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.161.880,00	649.641.500,00	98,86	280.341.800,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.722.291.836,00)	(7.314.087.003,00)	0	(5.210.484.352,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.722.291.836,00)	(7.314.087.003,00)	0	(5.210.484.352,00)

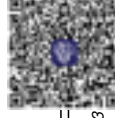




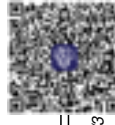
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00	86,10	1.752.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.600.000,00	0,00	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00	86,10	1.752.000,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.427.576.856,00	3.102.718.126,00	0,00	0,00	3.102.718.126,00	90,52	324.858.730,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.050.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	85,37	300.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	80,65	300.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.550.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	80,65	300.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.431.176.856,00	3.102.718.126,00	3.000.000,00	0,00	3.105.718.126,00	90,51	325.458.730,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.829.800,00	0,00	36.825.100,00	0,00	36.825.100,00	99,99	4.700,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.401.900,00	0,00	76.376.500,00	0,00	76.376.500,00	99,97	25.400,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.300.000,00	0,00	26.256.000,00	0,00	26.256.000,00	99,83	44.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.903.000,00	0,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	98,93	63.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	746.033.000,00	0,00	746.030.800,00	0,00	746.030.800,00	100,00	2.200,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.467.700,00	0,00	891.328.400,00	0,00	891.328.400,00	99,98	139.300,00
	DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	461.586.880,00	1.530.000,00	0,00	449.653.500,00	451.183.500,00	97,75	10.403.380,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.586.880,00	1.530.000,00	0,00	449.653.500,00	451.183.500,00	97,75	10.403.380,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.531.000,00	0,00	109.271.784,00	0,00	109.271.784,00	91,42	10.259.216,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa PeLAYANAN Umum Kantor	173.396.000,00	0,00	169.796.000,00	0,00	169.796.000,00	97,92	3.600.000,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.09	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	292.927.000,00	0,00	279.067.784,00	0,00	279.067.784,00	95,27	13.859.216,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.09.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.524.500,00	0,00	44.220.176,00	0,00	44.220.176,00	97,13	1.304.324,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.09.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.400.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	99,43	25.000,00
0.00 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.720.000,00	0,00	18.643.000,00	0,00	18.643.000,00	99,59	77.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.158.402.936,00	3.104.248.126,00	1.251.482.360,00	449.653.500,00	4.805.383.986,00	93,16	353.018.950,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.2	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.644.500,00	0,00	67.238.176,00	0,00	67.238.176,00	97,95	1.406.324,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.200.000,00	0,00	48.200.000,00	0,00	48.200.000,00	100,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.6	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	29.450.000,00	0,00	29.450.000,00	0,00	29.450.000,00	100,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.12	Pelayanan Informasi Publik	1.547.928.900,00	0,00	1.547.896.900,00	0,00	1.547.896.900,00	100,00	32.000,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 2.2.01.12	Layanan Hubungan Media	32.958.800,00	0,00	32.860.000,00	0,00	32.860.000,00	99,70	98.800,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.671.137.700,00	0,00	1.671.006.900,00	0,00	1.671.006.900,00	99,99	130.800,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.671.137.700,00	0,00	1.671.006.900,00	0,00	1.671.006.900,00	99,99	130.800,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01.2	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000,00	0,00	204.567.426,00	0,00	204.567.426,00	95,15	10.432.574,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01.3	Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	410.350.000,00	0,00	201.351.469,00	199.988.000,00	401.339.469,00	97,80	9.010.531,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.01.1.0 . 3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	625.350.000,00	0,00	405.918.895,00	199.988.000,00	605.906.895,00	96,89	19.443.105,00
	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.0.3-2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0,00	207.940.000,00	0,00	207.940.000,00	2.510.000,00
2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.0.3-2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	210.450.000,00	0,00	0,00	0,00	207.940.000,00	98,81
2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.0.3-2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	31.560.000,00	0,00	0,00	0,00	24.965.922,00	79,11
2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.0.3-2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.545.400,00	0,00	0,00	0,00	28.066.000,00	78,96
2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.0.3-2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	18.412.500,00	99,80
2.20.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	921.355.400,00	0,00	685.303.317,00	199.988.000,00	885.291.317,00	96,09
2.20.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	TOTAL KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	296.005.400,00	0,00	279.384.422,00	0,00	279.384.422,00	94,38
2.20.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
2.20.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan disseminasi Data Statistik Sektoral	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	100,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	100,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
2.21.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	0,00	62.127.900,00	100,00
2.21.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2.21.2-16.2-20.2-21.01.1.0.2-2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.267.900,00	0,00	36.103.900,00	0,00	36.103.900,00	91,94
	Jumlah	7.852.291.836,00	3.104.248.126,00	3.706.024.377,00	649.641.500,00	7.459.914.003,00	95,00

Rantau, 4 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

H.M. Tamberin, S.Sos, M.M.
NIP196302101986031028

